

# **AGAMA, MELITERISASI DAN KONFLIK (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)**

**SURAHMAN CINU**

E=lpdpsulawesitengah@gmail.com

**UNIVERSITAS TADULAKO**

## **Abstrak**

Religious and cultural pluralism in society can initially Poso acculturation establish the values among migrants with indigenous peoples, on further developments, have taken place between the social disintegration. Among of them, as a result of the escalation of conflicts horizontal, for a variety of interests growing, especially the expansion of economic and political institutions apparatus security. (Military and police) and religious and cultural pluralism imaged as a zone of still volatile, so that the imaging strengthen.

The existence of a conflict region as a market force. A balanced division of strategic positions in government with representing Christian and Muslim communities should be governed by clear local regulation and other rules or mechanisms in mind. The conflict became a powerful issue.

The security forces should be acting professionally make Indonesia secure and peaceful, the circulation of the various means of violence, such as firearms and bombs in Indonesia also business security forces in the conflict zone is security indicators are not handled in a professional manner. On the other hand required maximum effort and courage attitude of the government, especially the law enforcement agencies to bring those involved in cases of corruption and military violence should be given a participation in the strengthening of base-civil basis, such as combating corruption and strengthening peace program division of tasks and functions of a clear distinction between the security forces and society civilians can help realize a peaceful of Indonesia.

*Keyword: konflik, agama, militer, migrant, dan penduduk lokal*

## **PENDAHULUAN**

Setiap penilaian terhadap kemungkinan terjadinya proses perubahan sistem politik dimana militer dan sipil bersaing dipanggung politik nasional, bergantung pada perspektif yang digunakan, dalam menjelaskan kehadirannya dalam struktur politik di Indonesia. Militerisme modern ditentukan secara kultural sebagai resistensi dari sebuah situasi tak menentu menuju perubahan politik

selanjutnya, yakni apa yang selama ini dikenal sebagai sistem politik yang merepresentasi perjalanan demokrasi..

Demokrasi yang berkembang sebelumnya, memposisikan negara sebagai institusi politik yang melegitimasi semua kepentingan masyarakat. Sistem korporasi negara menempatkan militer dalam struktur politik dominan atas sipil. Determinisme fungsional, dengan menetapkan hubungan yang bersifat instrumental diantara aktor ekonomi dan aliansi militer, pada dasarnya

tidak memperlihatkan kecenderungan pada fenomena politik terbuka dan demokratis. Sebab, meskipun aliansi antara ekonom dan para birokrat militer, membuka peluang bagi terciptanya sistem yang lebih signifikan, berdasar sifat demokrasi liberal, namun hal itu hanya terjadi bagi berlangsungnya mekanisme ekonomi yang tunduk pada logika pasar bebas, demokrasi politik dan ekonomi belum tersentuh. Hal itu disebabkan akibat dari militer memfungsikan diri sebagai penjaga *status quo*, korporasi ekonomi dan politik dimunculkan sebagai upaya mempertahankan fungsi-fungsi politik.

Pendekatan demikian, menitik beratkan analisisnya pada para pemegang kekuasaan riil dalam sistem politik, dengan mempertimbangkan spesifiknya korporasi aparat keamanan dan penguasa sipil. Mereka dianggap mengalokasikan berbagai sumber daya sosial guna melegitimasi eksistensinya, berhadapan dengan masyarakat. Asumsinya bahwa, corak pasca otoritarianisme dari para penjamin keamanan (militer) terus berlangsung, dimana sipil meski menjadi pemegang kedaulatan rakyat, tetapi tidak berarti bahwa, kekuasaan institusi militer sudah termarjinal.

Gelombang militerisasi yang dialami Indonesia, agaknya mempertegas bahwa, meski kerjasama antara ekonom dan militer telah berlangsung cukup lama, namun sistem tersebut belum mengalami perubahan signifikan, bahkan sebaliknya, otoritarianisme muncul dalam bentuk dan paradigma baru.. Aparat keamanan dengan, atau tanpa dukungan elit sipil, menguasai sumber daya sosial. Dalam rangka mempertahankan eksistensi institusi tersebut didepan publik politik.

Penelusuran sejarah militer mengindikasikan bahwa, institusi ini menguasai berbagai sumber daya sosial, ekonomi, politik dan budaya, sejak rejim Orde Lama berkuasa, mereka merupakan satu-

satunya institusi yang memiliki dua fungsi yakni: keamanan dan politik (sosial). Dua fungsi tersebut mempertegas eksistensinya menguasai sumber daya sosial yang tersedia. Militer di Indonesia muncul sebagai jawaban terhadap posisi Indonesia yang sedang mengalami masa penjajahan, kemudian sistem politik memunculkan doktrin "jalan tengah" tahun 1950-an dan Dwi Fungsi ABRI tahun 1960-an. doktrin ini berlaku dalam masa yang berbeda tapi memiliki substansi sama, dominasinya dalam sistem politik dan tugasnya sebagai, penjaga pertahanan dan keamanan.

Sebagai institusi yang kokoh, militer Indonesia dilatar belakangi oleh ideologi yang komprehensif tentang dirinya, juga tentang bangsanya, Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar falsafah Pancasila, sering dibatasi oleh persepsi militer tentang situasi negara yang harus dilindungi, hal tersebut berkaitan dengan posisi negara yang sering ditafsirkan menghadapi ancaman serius. Bagi aparat keamanan (militer khususnya), ancaman itu muncul terutama dari komunisme dan pemisahan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (kasus terakhir) lihat misalnya kasus terjadinya kekerasan di Maluku, yang dikaitkan dengan terpisahnya Timor Lorosae (Timor-Timur) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI).

Kekhawatiran yang berlebihan terhadap fenomena yang mereka tafsirkan sendiri, memungkinkan institusi itu mengambil langkah-langkah yang kontra produktif dengan demokrasi. Melakukan depolitisasi dan deideologisasi dalam masyarakat. Robert P. Clark (Fatah, 1999 : ix) mengemukakan bahwa,

"militer merupakan kekuatan yang signifikan sepanjang paruh kedua abad ke-20, kekuatan mereka tidak hanya datang dari kekuatan persenjataan belaka, namun basis ekonomi politik yang berhasil mereka galang selama berkuasa atau ikut serta

berkuasa. Di atas basis-basis ekonomi politik inilah, militer berhasil melakukan konsolidasi kekuatan sebagai sebuah "partai politik" dengan memakai institusi politik sipil seperti Golongan Karya (Golkar) untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat".

Apakah menghadapi situasi politik, militer Indonesia cenderung berlaku tidak demokratis ?. Kecenderungan untuk bersifat a politik sangat sering terjadi, apalagi ketika gugatan terhadap eksistensi mereka dimunculkan. Terdapat beberapa momentum mereka mengarahkan massa melakukan gugatan terhadap *status quo*, namun hal itu terkait dengan eksistensi mereka dalam sistem politik. Pergantian rejim, dari Orde Baru ke Orde Reformasi menunjukkan hal itu.

Perubahan bentuk otoritarianisme politik yang didominasi oleh militer, nampaknya akan mengalami pergeseran ke arah demokrasi, terlihat ketika rejim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto dipaksa turun melalui momentum 21 Mei 1998. Institusi ini cenderung membiarkan situasi demikian berlangsung. Penguasai Militer (Soeharto) dengan alasan konstitusi digantikan oleh sipil (Habibie) Demokrasi tampaknya tidak bisa dielakkan bakal hadir di Indonesia. Bahkan Habibie harus menumpang gelombang demokratisasi agar tetap bisa berkuasa.

Masa peralihan pemerintahan tersebut, Militer tidak memiliki pilihan lain, kecuali beraliansi dengan sipil agar tidak tercerabut dari posisinya, dilain pihak pemerintahan sipil diuntungkan, sebab ia melakukan dukungan politik, sekalipun masih bersifat sementara. Terlihat ada kerjasama antara sipil dan militer, yang berupaya melakukan proses politik demokratis, hal tersebut itu akibat adanya desakan massa. Fenomena politik yang berjalan sangat cepat demikian, menurut Huntington (1991) sebagai sebuah model transformasi menuju demokrasi dengan melalui jalan dari atas. Kecepatan gerak dan

bentuk-bentuk demokratisasi dikendalikan oleh negara, dimana sipil dan militer bekerjasama. Ketepatan, pengalaman politiknya dan dominasi atas sumber daya sosial, membuat mereka mampu mengontrol sistem politik yang sedang berlangsung.

Kekuatan militer dalam sistem politik Indonesia ke depan, posisinya masih cukup diperhitungkan, tuntutan dihapuskannya peran sosial politik mereka, merupakan hal yang sulit. sebab peran tersebut muncul bersamaan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dipakai sebagai alasan historis, meski tidak pernah mengemuka, walaupun sejarah kelam mereka juga memberi warna bagi perjalanan kehidupan politik Indonesia, penerapan sistem politik yang otoriter pada saat Orde Baru berkuasa. Berbagai tuntutan agar insitusi itu dihapuskan peran politiknya, mengkondisikan mereka agar tetap bertahan, berbagai peristiwa sosial juga mengitari tuntutan tersebut, signifikansi bagi peran mereka sangat menonjol.

Kenyataan bahwa Militer belum sepenuhnya menerima gagasan tentang penghapusan hak-hak politiknya, dapat dilihat dalam perspektif hubungan sipil-militer. Artinya, bagaimana kontrol yang dilakukan oleh pihak sipil terhadap militer, sebaliknya, bagaimana pengakuan sipil terhadap otoritas yang selama ini di pegang atau minimal yang menjadi bidang militer. Hal lain yang dapat dilihat menyangkut posisi sipil – militer, sejauhmana pihak sipil mampu mengurangi hak prerogatif militer dalam urusan politik dan ekonomi, demikian pula dengan militer dalam kaitannya dengan otoritas ekonomi politik mereka.

### **Konflik dan Integrasi.**

Seorang pemikir tentang teori-teori sosial, Ibnu Khaldun (1377) mengatakan bahwa, agama memiliki pengaruh terhadap kekuasaan negara "Jika konflik berlangsung dalam tatanan kekuasaan maka negara akan

menjadi lemah cepat hancur dan musnah” (Khaldun, 1962 : 41). Teori politik Khaldun menghendaki, bahwa kekuasaan hanya dapat dipegang oleh satu orang atau kelompok politik saja yang mengendalikan pemerintahan, jika banyak orang atau kelompok maka akan dapat bermuara pada kehancuran dalam pemerintahan tersebut” (Khaldun 1962 : 22-230). Analisis tersebut hubungannya dengan kekuasaan tunggal, dimana kepala pemerintahan memiliki otoritas kuat menata negara, memungkinkan munculnya satu bentuk kekuasaan absolut dimana wewenang pemerintahan (negara) berbasis pada legitimasi tersebut.

Persoalan kemudian muncul, ketika otoritas kekuasaan absolut dimana lakon politik otoritarian melegitimasi hak-haknya. Sebuah kekuasaan yang dipegang tanpa batas dengan kewenang yang tidak jelas, dapat membawa struktur pemerintahan yang otoriter dan hilangnya kemerdekaan politik masyarakat. Dalam sistem politik dimana masyarakat terpetakan dalam realitas yang plural, dengan sendirinya membuka ruang luas bagi setiap komponen sosial melakoni sistem politik partisipatoris, penempatan ruang politik dengan sistem otoritarian kondusif pada struktur masyarakat plural, karena itu sistem politik yang memposisikan publik memiliki ruang kontrol bagi jalannya kekuasaan lebih memiliki alasan argumentatif.

Fenomena konflik tanpa kekerasan dianggap memiliki argumentasi kuat bagi realitas masyarakat plural. Uraian tentang teori politik Ibnu Khaldun (2000 : 238) yang merepresentasi lakon kekuasaan tunggal hendaknya dipahami sebagai alternatif bagi bangunan teori yang lebih mengedepankan akal budi (agama) sebagai penyerta. Sebab, menurut Khaldun bahwa hakekat agama mampu mengantarkan manusia kejalan kebenaran sehingga dapat mempersatukan tujuan manusia. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa

”Untuk meniadakan pertentangan cukuplah setiap orang mengetahui bahwa kezaliman diharamkan atasnya berdasarkan hukum akal. Dengan demikian dugaan mereka (sebagian filosof/ilmuan) bahwa pertentangan hanya mungkin dengan adanya syariat disatu sisi dan kedudukan iman disisi lain tidaklah benar. Pertentangan itu dapat dilenyapkan baik dengan adanya kekuatan para pemimpin atau usaha rakyat menjauhkan diri dari pertikaian dan saling berlaku zalim, maupun dengan adanya jabatan iman tersebut. Dengan demikian dalil *aqli* (akal) yang didasarkan pada premis itu tidak tahan uji maka dengan itu teranglah keharusan adanya iman diindikasikan oleh syariat melalui konsensus atau *ijma*.”

Perspektif tersebut memberi gambaran bahwa, kepemimpinan dengan wewenang otoritas begitu kuat dapat saja berlangsung, saat akal budi (nilai-nilai moral agama) menjadi perangkat yang memiliki kemampuan mengontrol mekanisme politik yang sedang berlangsung. Agama beserta ajaran-ajaran moral ikut berinteraksi. Hanya saja realitas agama dalam konteks sosiologi, seringkali menjadi alat legitimasi bagi munculnya sistem politik yang *menzalimi* (menindas). Perspektif Khaldun menjadi agak sulit analisisnya ketika sistem sosial dalam masyarakat majemuk, dimana terdapat berbagai kepentingan ekonomi politik dan budaya saling berintegrasi.

Analisis konflik dalam penelitian ini, lebih bertumpu pada pemikiran dan perspektif teori Barat, sebab belum ditemukan sebuah alternatif pemikiran yang lebih Timur. Analisis konflik selama ini lebih bertumpu, terutama pada dua bangunan *grand theory* Karl Marx dan Lewis A. Coser walaupun disadari bahwa perspektif demikian sebagaimana kata Juhaya S. Praja (2000 : 45) bahwa :

” Menurut aliran teori konflik masyarakat yang baik dan sehat adalah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual.

Masyarakat yang berada dalam keseimbangan (*equilibrium*) dianggapnya sebagai masyarakat tertidur dan berhenti dalam proses kemajuan. Karena konflik atau bentrokan sosial dianggapnya sebagai kekuatan utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap-tahap yang lebih sempurna. Dalam konteks ini pengaruh perilaku agama yang dianggap memiliki "daya disintegratif" menjadi positif. "Manusia atau masyarakat dalam perspektif Marxian dipahami sebagai sebuah proses perkembangan menyelesaikan konflik melalui mekanisme konflik pula" (Cambell, 1999 : 134). Konflik adalah mekanisme yang mendorong suatu perubahan hubungan antar konflik dan perubahan cenderung menjadi satu poses yang berlangsung dengan sendirinya terus menerus" (Lauer, 1993 : 287-290) Konflik sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan perubahan sosial masyarakat. Para ilmuwan sosial menganalisis dan memakai konflik dan perubahan merupakan dua entitas yang saling berhubungan dan melengkapi, sebagaimana kata Dahrendorf (1993 :281). bahwa "tampak adanya hubungan erat antara konflik dan perubahan"

Pemikiran tentang konflik dan perubahan sosial tidak saja diminati oleh ilmuwan Marxian, juga mereka yang berasal dari kubu Hegelian, seringkali memakai perspektif tersebut dalam menjelaskan realitas sosial masyarakat. Max Weber mengatakan bahwa "konflik adalah sebuah bentuk hubungan yang didalamnya mengandung tindakan yang sengaja diarahkan untuk melaksanakan kehendak sipelaku sendiri untuk melawan serangan partai atau partai-partai lain" (Cambell, 1999 : 211) meski dua teori sosial yang berbeda kutub tersebut secara bersamaan memosisikan konflik sebagai satu realitas, namun terdapat perbedaan substansial diantara mereka dalam

memahami fenomena tadi. Kaum Hegelian memandang konflik sebagai upaya masyarakat mempertahankan harmoni baik dengan *in group* maupun pada *out group*".

Ilmuwan Marxis memahami, bahwa konflik adalah tindakan sosial masyarakat untuk mempertahankan eksistensi *in group* terhadap *out group*, sebab sebagaimana dalam perspektif Marx klasik, bahwa sejarah peradaban manusia ditandai oleh sifat-sifat kelas yang saling memakan satu dengan lainnya, manusia selalu dituntut menjaga eksistensi kelasnya, karena sejarah peradaban manusia adalah sejarah perjuangan kelas dimana konflik menjadi jalan utama mempertahankan eksistensi *in group*.

Pemikiran Marxis klasik demikian telah dikritisi oleh beberapa ilmuwan sosial yang muncul belakangan Lewis A Coser membedah Marx dengan menggabungkan dua kubu yang bertentangan, Coser memahami, bahwa beberapa susunan struktur merupakan hasil dari konsensus, sebuah proses yang sering ditonjolkan oleh mereka yang berasal dari kubu fungsional struktural. Sementara disisi lain, Coser tidak mengabaikan begitu saja adanya proses lain yang melalui jalan konflik sosial. Meski Coser menekankan bahwa struktur sosial dapat bertahan sebagai akibat dari proses konflik dalam masyarakat. Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, konflik positif membantu struktur sosial. sebaliknya saat konflik terjadi secara negatif, akan memperlemah struktur sosial masyarakat.

Coser membagi konflik dalam dua jenis yaitu, *in group* dan *out group* *in group* lebih ditekankan pada konflik yang terjadi diantara internal kelompok masyarakat, selanjutnya menurut Coser (Poloma 2993 : 108).

"didalamnya mengandung unsur-unsur positif, sebab fenomena tersebut menurutnya, akan membawa *in group*

kedalam struktur kelompok yang lebih kokoh, sementara konflik yang terjadi diluar kelompoknya (*out group*) juga memiliki fungsi positif sebab akan memperkuat basis pada masing-masing *in group*”

Fenomena konflik tidak sekedar dipahami sebagai jalan menuju perpecahan *an sich*, beberapa ilmuwan sosial menekankan bahwa konflik pada dasarnya membawa masyarakat ke arah perubahan struktur sosial yang lebih kokoh dan tidak sedikit menghasilkan integrasi antar warga, Duverger(1998 :251) mengatakan bahwa ”konflik dan integrasi bukanlah dua aspek yang kontradiktif keduanya saling melengkapi” Analisis konflik dari Coser lebih dilihat dalam konteks integrasi dan penguatan basis struktur dalam *in group*. Untuk analisis ini, agak sulit menganalisis perspektif yang dia bangun, pada kubu mana dia diposisikan, sebab, dua analisis utama yang dikembangkan oleh Coser bersentuhan dengan perspektif bahwa, susunan struktur merupakan hasil persetujuan dan konsensus dimana proses tersebut sangat ditekankan oleh kaum struktural fungsional sementara ia juga menunjuk sebuah proses lain, yaitu konflik sosial yang merupakan bangunan teori utama kaum Marxin. Terutama pada Marxin klasik. Hal itu dapat terpetakan, jika Coser dalam analisis selanjutnya, berupaya memetakan proses terjadinya konflik tidak selalu dipahami sebagai upaya mempertahankan struktur sosial. Fenomena konflik berkaitan erat dengan proses kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat, apakah ia berada dalam kelompoknya (*in group* maupun diluar komunitasnya, *out group*) sebab dalam struktur sosial *in group* seringkali individu memakai kelompoknya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi politik.

Individu masyarakat memiliki kepentingan yang sama atau berbeda dalam proses perebutan sumber daya, sementara

potensi yang diperebutkan terbatas,. Fisher dkk berpendapat bahwa salah satu potensi penyebab konflik adalah terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa : (2001 : 8-9).

”Konflik dapat disebabkan oleh (1). polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan dalam kelompok masyarakat ; (2). ketidakselarasan posisi dan perbedaan pandangan ; (3). tidak terpenuhinya kebutuhan ; (4). keterancaman identitas atas peristiwa masa lalu yang tidak terselesaikan ; (5). ketidakcocokan budaya; (6). ketidaksetaraan dan ketidakadilan”.

Sementara itu Tajudin mengatakan bahwa konflik dapat juga disebabkan oleh ”perbedaan persepsi, pengetahuan, tata nilai, kepentingan,dan pengakuan hak kepemilikan” (Adimihardja 2000 ; 59).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. sebagai prosedur penelitian, sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Tailor bahwa ”menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati” (Moleong 1999 : 2-3) Gama (1999 : 29) mengatakan bahwa ”pendekatan kualitatif adalah untuk mencari kebenaran relatif, ” sementara itu Chadwick et.al (1988 : 235) mengatakan bahwa ”penelitian kualitatif mengacu pada strategi penelitian observasi partisipan dan wawancara mendalam yang bertujuan untuk memahami aktivitas yang diselidiki yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan”. Pendekatan kualitatif memiliki perspektif ganda yang peneliti membangun perspektif demikian berdasarkan analisis lapangan.

Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yang secara signifikan mempengaruhi penajaman substansi penelitian. Pertimbangan itu adalah: Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, obyek dan subyek penelitian bersentuhan langsung. Metode kualitatif lebih tepat dipergunakan saat penelitian berhadapan dengan fenomena ganda, dalam studi ini, yang diteliti adalah masalah konflik yang memiliki perspektif ganda. Kemudian, "Penelitian kualitatif dianggap peka, tajam dan mampu menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi" (Moleong 1999 : 5).

Pendekatan kualitatif merupakan sistem perangkat kerja dalam menggali, menguji dan membentuk teori, penelitian kualitatif menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh sebab itu, Peneliti mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks dari fenomena yang ada, yang selanjutnya dalam penelitian deskripsi analitik, mempelajari masalah dalam masyarakat, yaitu tata cara yang berlaku serta situasi tertentu, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang terjadi, sekaligus suatu pengaruh dari fenomena. Pendekatan deskriptif analisis mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang fenomena yang ada, yaitu bagaimana situasi, kegiatan, proses dan pengaruh yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini tidak secara khusus melakukan uji hipotesis, namun dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat bagi fenomena sosial tertentu. "Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun ed. 1995 : 4-5). Hipotesis kerja yang dirumuskan dalam penelitian ini difungsikan sebagai pemandu penelitian, dalam arti, "fenomena sebab -

akibat yang diteliti senantiasa mengacu dan berpatokan terhadap *research guide* tersebut" (Soewardi 2004 : 168).

### **Fenomena Konflik : Kasus Poso**

Konflik Poso dalam episode kelima, terjadi pada 3 Desember 2001 yang ditandai dengan sebuah peristiwa pertempuran sengit dari dua kelompok yang berseteru, medan perang dipilih di wilayah Poso pesisir. Dalam episode ini penggunaan simbol-simbol agama begitu menonjol, lebih kuat dari konflik jilid ketiga yang juga mengusung agama sebagai perekat dalam konsolidasi diantara kelompok-kelompok yang bertikai.

Awalnya, konflik jilid lima dipicu oleh sebuah ledakan oleh pelaku yang sampai saat ini belum teridentifikasi, dia melepaskan tembakan ke arah desa Tabalu yang berpenduduk mayoritas Islam, sebuah desa yang berbatasan dengan desa Betalembah dengan penduduk yang berbasis Kristen. Tembakan tersebut kemudian dilayani oleh penduduk yang beragama Islam dan dengan bantuan dari Laskar Jihad (FKAW) Pasukan Muslim melakukan penyerangan ke desa-desa yang memiliki basis penduduk Kristen, seperti, Sanginora, Bisalemba, Patiwunga dan Tangkura. Penyerbuan itu dilakukan secara sistematis dan terencana tidak seperti penyerangan yang terjadi sebelumnya. Dan membuat warga di desa- tersebut lari mengungsi ketempat-tempat aman.

Penyerangan oleh kelompok Muslim dengan bantuan penuh dari kelompok Laskar Jihad (FKAW) berlangsung dua hari dan berhasil menundukkan desa-desa tersebut, Keberhasilan kelompok Muslim kemudian mengilhami mereka untuk kembali melakukan penyerbuan dengan cara bergerilya memasuki wilayah yang berpenduduk mayoritas Kristen. Dua desa di kecamatan Lage, yakni Sepe dan Silanca menyusul dikuasai, kedua desa tersebut mengalami kerusakan parah.

Berbagai pertempuran dan penyerangan kemudian terjadi desa-desa menuju arah Tentena, perlahan-lahan dikuasai oleh Kelompok Muslim dan laskar Jihad. Penyerbuan sebagai upaya masuk dan menguasai Tentena basis Krsiten ketika pasukan Muslim telah mendekati daerah itu, menurut rencana Laskar Jihad dan kelompok Muslim Poso akan menduduki Tentena bersamaan dengan waktu perayaan Hari Raya Idul Adha,

Peristiwa tersebut tidak terjadi, akibat pasukan keamanan berhasil mencegah dan menyuruh mereka tidak memasuki wilayah itu. Sekali lagi tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia memberi kontribusi cukup signifikan dalam mencegah masuknya pasukan Muslim di Tentena. Sama dengan Poso, Tentena juga yang merupakan wilayah “status quo” komunitas Kristen, tidak berhasil dimasuki oleh pasukan Muslim.

Konflik dan kekerasan di Poso, dari episode jilid satu yang dimulai Desember 1998 sampai dengan episode jilid lima juga terjadi pada bulan Desember tahun berbeda, 2001, kurun waktu yang cukup lama (tiga tahun), telah mporora-porandakan infras-truktur masyarakat, seperti, pemukiman masyarakat, rumah-rumah ibadah yang menjadi simbol agama, bangunan sekolah Namun yang lebih parah adalah rusaknya suprastruktur masyarakat Poso, yang telah sekian tahun dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan, *sintivu maroso*, seperti jalinan hubungan yang erat, dengan berbagai momentum keagamaan tanpa pilih, mereka saling mengunjungi, bersilaturahmi, saling memberi perhatian dan kasih sayang diantara mereka.

Bersamaan dengan hancurnya infrastruktur masyarakat Poso, juga ikut rusak suprastrukturnya, yang terjadi pasca konflik dan kekerasan adalah munculnya sikap saling curiga diantara sesama masyarakat, Sikap saling curiga tersebut, terasa begitu kental

salah seorang informan bernama Hasan mengatakan :

“ berjalan-jalan di Poso apalagi pada malam hari harus lebih berhati-hati desa kami aman (Sintuwulemba) saat malam kami melakukan ronda (siskamling) masyarakat baik yang Kristen maupun yang Islam ditambah dengan aparat keamanan bergabung untuk jaga malam, meski suasananya aman – aman saja, namun mulai pukul 21.00 malam masyarakat sudah takut untuk keluar malam mereka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di desa tetangga kami, sekitar dua kilo meter dari rumah ini (rumah Hasan. pen) beberapa waktu lalu (November 2005) telah terjadi pembunuhan tiga orang murid Sekolah Menengah Atas”<sup>1</sup>.

Hasan adalah sopir di salah satu perusahaan angkutan umum di Poso selain itu ia juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian dan pengusutan kasus korupsi yang berhubungan dengan konflik Poso. Fenomena Hasan sesungguhnya mengindikasikan, bahwa di Poso telah terjadi perkembangan signifikan tentang partisipasi masyarakat dalam hal keamanan dan perdamaian. Masyarakat antusias dengan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan dan isu-isu korupsi. Hasan meski sebagai masyarakat biasa, ia terlibat aktif di berbagai aktivitas kemanusiaan di Poso. bahkan menurut Samsuri<sup>2</sup>, “ia salah satu anggota kami yang paling vokal mempersoalkan kasus-kasus korupsi kaitannya dengan konflik di Poso”<sup>3</sup>.

Korupsi bagi sebagian masyarakat Poso dianggap sebagai salah satu penyebab terjadi dan lestarinya konflik, Korupsi, meski bukan satu-satunya penyebab konflik, saat ini telah menjadi persoalan tersendiri. Sangaji

<sup>1</sup> Wawancara di Poso tanggal 30 November 2005

<sup>2</sup> Samsuri adalah anggota Forum Studi Masyarakat Sipil Poso

<sup>3</sup> Wawancara di Poso tanggal 2 Desember 2005



## **Surahman Cinu; Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)**

mengatakan bahwa “pihak yang memiliki kaitan dengan dana KUT tersebut, menyulut kerusuhan sebagai strategi menutupi korupsi” (Kompas 31 M1 2005) demikian pula dengan dana kemanusiaan bagi para pengungsi, juga diindikasikan terjadi penyelewengan, pelaku korupsi disamping orang pemerintahan, juga dari pihak swasta (pengusaha). Indikasi kearah itu makin jelas, ketika beberapa orang yang terkait dengan dana kemanusiaan tersebut, ditahan.

Lestarnya konflik komunal Poso memiliki beberapa penyebab, dan telah terakumulasi sedemikian rupa, isu perebutan kekuasaan di aras lokal dan nasional, isu dana korupsi Kredit Usaha Tani (KUT) dan kuatnya program sipilisasi, yang menuntut agar militer kembali menjalankan fungsi-fungsi keprajuritan dan meninggalkan kancah bisnis dan politik, sementara adanya ketimpangan ekonomi antar masyarakat asli dan kaum migran merupakan pemicu bagi eskalasi konflik yang lebih besar. semuanya terakumulasi dan dianggap sebagai penyebab awal dan lestarnya konflik Poso. Arianto Sangaji mengatakan bahwa :

“ Konflik Poso tidak bisa direduksi sekedar sebagai kekerasan etnoreligi dimana agama dan suku dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kekerasan, saya mengakui bahwa kekerasan Poso boleh disebut dengan dimensi yang penuh dengan dimensi ekonomi politik, agama dan suku memang dipakai, tapi dipakai bukan satu tujuan, tapi sebagai alat untuk mengeksploitir untuk menggalang dukungan melakukan kekerasan. Oleh karena itu penyelesaian terhadap kekerasan Poso yang dilakukan dengan pendekatan rekonsiliasi antara kedua belah pihak menurut saya, tidak cukup untuk menyelesaikan konflik Poso secara

komprehensif karena dasar masalahnya ekonomi politik bukan etnoreligi”<sup>4</sup>

Masyarakat melihat konflik yang ada, terbagi atas dua pandangan. Yaitu pertama memahami bahwa, konflik yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh adanya korupsi KUT dan dana kemanusiaan<sup>5</sup>,. Sementara yang lain menilai bahwa aparat keamanan lebih kontributif bagi terjadinya kekerasan. Pandangan yang terakhir juga menilai bahwa konflik memiliki kaitan dengan gugatan terhadap eksistensi TNI.dalam bisnis dan politik.Kajian tidak terfokus pada penilaian pertama. Isu kedua meski diungkap, namun lebih diarahkan pada persoalan penguasaan sumber daya sosial yang merupakan kajian utama penelitian ini.

Konflik jilid satu sampai dengan jilid lima, telah berlangsung, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan begitu besar.. Berbagai ekkses terjadinya kekerasan, telah menimpa masyarakat di Poso, banyak korban berjatuhan, jiwa, harta benda (materil) beban psikologis dan masa depan anak anak Poso yang sampai saat ini belum sepenuhnya pulih, terutama bagi para korban kekerasan.

Konflik jilid pertama merupakan ajang awal pertarungan dua komunitas yang berbeda agama, setelah terjadinya peristiwa pertama, Poso kemudian dilanda konflik secara beruntum sampai pada episode jilid lima, dengan berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi, sampai akhirnya terbit instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 2005<sup>6</sup> tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Inpres ini ditujukan pada 14 lembaga pemerintahan, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan sampai pada Bupati Kabupaten

<sup>4</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

<sup>5</sup> Lebih jauh lihat Damanik, Rinaldi, Tragedi Kemanusiaan Poso Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. PBHI, Yakoma, CD Bethesda 2003.

<sup>6</sup> Lihat lampiran tentang Instruksi Presiden NO. 14 tahun 2005

Poso, dengan memuat tiga perintah, yaitu, pelaksanaan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi,

Kedua, menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya. Terakhir, memuat upaya penanganan masalah Poso dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino yang berlangsung tanggal 20 Desember 2001 di Malino Sulawesi Selatan<sup>7</sup>

Setelah kejadian tahun 2000, yang menandai berakhirnya konflik jilid empat, fenomena konflik telah bergeser, dari peperangan secara terbuka, ke kejadian yang berlangsung secara tersembunyi, seperti adanya pembunuhan, dengan cara biasa dan mutilasi, penembakan misterius. Kejadian tersebut menandai pergeseran konflik di Poso ke wilayah yang lebih meruncing, Melibatkan negara (pemerintah dengan masyarakat sipil). Banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat saat konflik maupun pasca konflik, mengindikasikan terdapat jaringan kuat yang bekerja dalam rotasi konflik, dengan cara mempertemukan dua komunitas agama berbeda yang telah terkondisikan oleh perasaan psikologi, kemarahan, dimana selanjutnya, dua kelompok tersebut ditata secara sistematis, melakukan pergerakan konflik atas nama dan simbol agama. Uraian tentang peristiwa konflik yang sengaja dipaparkan dalam bentuk narasi, tanpa sentuhan analisis mendalam dan teoritik, dimaksudkan sebagai upaya pemahaman secara apa adanya.

Berbagai gejala yang terjadi sejak awal, atau saat berlangsungnya konflik, memberi gambaran bahwa kekerasan di Poso meski dipermukaan nampak sebagai konflik etnoreligius, namun sesungguhnya sarat

dengan muatan ekonomi politik. Sebagai mana dijelaskan sebelumnya bahwa, awal konflik dipicu oleh kepentingan politik antara beberapa kelompok elit yang berbeda, tapi memiliki kepentingan serupa, isu ekonomi dalam arti macetnya Kredit Usaha Tani pada pemerintahan ikut memperkuat konflik. sementara, demi perluasan eskalasi konflik, maka beberapa broker konflik bekerja dengan mengusung isu, terjadi ketimpangan sumber daya sosial (ekonomi) antara masyarakat asli dengan masyarakat migran.

Fenomena demikian memperkuat dan mengkonsolidasi masyarakat melakukan mempersiapkan konflik agar lebih meluas, ditambah lagi dengan karakteristik masyarakat dua komunitas agama berbeda mempersepsikan dan memakai simbol-simbol agama sebagai perekat bagi masing-masing *in group*. Namun demikian tidak berarti masyarakat sipil dalam berkonflik berdiri sendiri, beredarnya alat-alat kekerasan, seperti senjata api, amunisi dan bom yang beredar luas di masyarakat di dua komunitas yang bertikai, mengindikasikan negara beserta alat-alat represinya memiliki peran signifikan dalam konflik Poso. Arianto Sangaji mengatakan bahwa :

"Aparat keamanan sebetulnya bisa dengan mudah melacak dari mana senjata api itu kalau mau melakukannya, PT Pindad mudah sekali melacak, tapi kita tidak pernah melihat itu, menurut saya, ini salah satu indikasi bahwa tampaknya ada satu bentuk operasi intelijen yang tertutup, rapi di bawah yang menyuplai senjata dan amunisi kepada warga yang bertikai, soal lain yang berkaitan dengan kepentingan institusional dan operasional dari aparat keamanan"<sup>8</sup>

Fenomena konflik di Poso memakai dua model yakni, distribusi dan informasi. intraksi terjadi disepanjang jalan poros Trans

<sup>7</sup> Dokumen Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

2005 : 1-2

<sup>8</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

Sulawesi, dimana Poso merupakan daerah yang dilalui kendaraan yang melintas dari arah selatan maupun tengah Sulawesi. Intensitas perkelahian yang terjadi sejak bulan Mei 2000 dan selanjutnya dimulai dengan modis lama. Persoalan-persoalan kepentingan penguasaan sumber daya politik, minimal terjadi keseimbangan kekuatan dalam struktur pemerintahan yang merepresentasi dua kelompok, terjadinya transformasi moda produksi dari sistem feodalisme yang didominasi oleh masyarakat asli ke moda produksi kapitalisme lokal yang dikuasai oleh kaum migran, merupakan isu perekat sebelum berbagai sumber daya ikut berinteraksi, berdasarkan kepentingan masing-masing.

Dalam hal distribusi dan informasi Ketika perkelahian terjadi, solidaritas kelompok (etnis dan agama) terkonsolidasi dengan menempuh beberapa cara, seperti penyebaran isu dengan simbol-simbol keagamaan, isu ketimpangan ekonomi antar pendatang yang secara relatif makmur, dengan masyarakat asli yang tertinggal. Dua isu ini kemudian membangkitkan sikap heroik (kepahlawanan) dari tokoh-tokoh agama dan etnis di desa yang berani tampil mempertaruhkan jiwanya demi kepentingan yang dibela.

Konflik Poso pada jalur kedua, yaitu informasi wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak saling berinteraksi menjadi terhubung. Jaringan telah terbentuk antara penduduk desa dengan kelas menengah Kota. yang terkait persoalan birokrasi, Jaringan kemudian meluas lebih jauh merambah ke berbagai wilayah yang sebelumnya tidak berinteraksi. Para perantara birokrasi memainkan peran cukup signifikan dalam pembentukan jaringan tersebut.

Sesungguhnya mereka yang bertarung dalam perebutan kekuasaan bukan orang-orang yang mempersoalkan agama, namun ketika kelompok yang bekerja dikalangan mereka, seperti pelobi, telah melakukan

pengumpulan dukungan, agama dipakai sebagai perekat untuk memperluas pengaruh karena dianggap efektif untuk itu. Di Poso banyak terdapat organisasi keagamaan demikian, juga di luar Poso, dan Sulawesi Tengah, sementara infrastruktur politik masih cukup lemah dipakai untuk mengatasi semangat berkonflik.

Jaringan agama dan budaya jauh melakukan lompatan melampaui wilayah kabupaten Poso, Kelompok Kristen memiliki kontak dengan jaringan, memperjuangkan bantuan bagi gereja yang musnah terbakar. Kelompok ini memiliki jaringan internasional termasuk dalam kongres Amerika Serikat, mereka memiliki kemudahan masuk dalam institusi tersebut, guna menyusun laporan mengenai situasi terakhir di Poso. Februari 1999, terjadi dengar pendapat antara kongres Amerika Serikat dengan kelompok ini. Dipihak Islam pada tahap awal belum terbentuk jaringan baik nasional maupun internasional.

Mekanisme penting dalam proses perluasan eskalasi konflik adalah dalam hal pengenalan ciri-ciri yang khas masing-masing komunitas. Para pelaku diberbagai tempat dan suasana, saling mengidentifikasi diri guna menentukan langkah untuk aksi bersama. Identifikasi sebagai Muslim atau Kristen dianggap sebagai syarat utama dalam proses "perjuangan kepentingan" sementara identitas lain, seperti suku, etnis dipilih sebagai alternatif.. Bagi beberapa pelaku dijadikan sebagai pertimbangan dan menjadi latar belakang lobi. Agama yang dijadikan sebagai alternatif perekat jelas, memiliki pertimbangan khusus, bahwa institusi tersebut mampu membuka ruang lebih luas guna membangun koalisi, apakah sifatnya permanen atau sejenak.

Tanah dan berbagai penguasaan sumber daya sosial lain dianggap sensitif mendampingi isu-isu agama guna pelebaran konflik, awalnya memang belum menjadi isu, namun belakangan dilibatkan karena

dianggap efektif menjelaskan realitas masyarakat Poso pedesaan. Sebab bagaimanapun, pragmatisme petani (orang desa) dapat tertransformasi menjadi reaktif ketika harga diri sebagai penduduk asli yang termarginalkan terusik. Mereka kemudian memberi respon aktif, menyikapi pola penguasaan lahan pertanian, dimana para pendatang memperlihatkan dominasinya. Mereka keberatan jika wilayah ulayatnya tidak lagi menjadi miliknya. Sebab hak ulat bagi mereka bukan hanya identitas produksi, lebih dari itu, ia bagian dari eksistensi dan harga diri

Peran budaya dan agama dalam konflik jilid pertama dan kedua, meskipun tidak sebesar pengaruh sebelum tahun 1998, namun terlihat dari beberapa kejadian saat dipakai untuk mengatasi konflik yang terjadi. Institusi ini memungkinkan rasa tidak puas terhadap struktur, agama dan budaya menyediakan tatanan lewat mana komponen masyarakat melegitimasi eksistensi institusi itu. Institusi ini berperan pada kondisi-kondisi tertentu, tetapi ia tidak memfungsikan diri untuk melakukan perubahan struktur. Masalah dasar dari konflik tidak terpecahkan

Kekerasan dihambat oleh institusi tersebut agar tidak berpaling melawan obyek aslinya, yaitu institusi masyarakat sendiri yang mencakup biaya bagi sistem sosial yang telah terbangun sepanjang sejarah Poso, mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem, guna memenuhi tuntutan kondisi yang sedang mengalami perubahan kearah yang lebih fatal. Potensi konflik tetap dibiarkan berlangsung, namun dalam frekuensi yang terkendali. Ketika institusi resmi tidak lagi mampu mengendalikan gejolan, maka yang tampil kemudian adalah institusi non formal di masyarakat, sebagai pemangku tradisi dan budaya masyarakat masih melegitimasi eksistensinya. Ia merupakan warisan tradisi yang telah berinteraksi dalam masyarakat, sementara institusi formal, kurang absah kehadirannya akibat dari interaksi yang dia

bangun menimbulkan banyak persoalan kaitannya dengan struktur yang berubah.

Institusi ini diharapkan oleh masyarakat mampu merefleksi perubahan yang terjadi, misalnya berbagai kebijakan dapat menjadi pilihan mengatasi kesenjangan, namun alternatif yang dia bangun justru bagi sebagian masyarakat asli dianggap hanya merefleksikan kebutuhan ekonomi borjuasi lokal kaum migran, akhirnya lembaga-lembaga formal tidak berhasil mengkondisikan masyarakat agar tidak terjadi kekerasan.

Pada kondisi lain, institusi non formal ikut terlibat dalam media konflik, berupaya mempertaruhkan eksistensi adat didepan publiknya, dalam beberapa hal, ia berhasil atas nama budaya ia kemudian berupaya mentransformasikan konflik ke integrasi antar individu-individu masyarakat. Penjelasan tentang konflik awalnya diterima sebagai logika, pada prinsipnya bertentangan dengan realitas ketimpangan.

Proses dialektika konflik sesungguhnya terjadi diarah konflik, bahwa konflik tahap awal memungkinkan terjadi integrasi, perubahan selanjutnya terjadi antitesis dari tesis tadi (integrasi) yaitu konflik yang telah ter-eskalasi dalam bentuk kekerasan, dengan mengorbankan harga sosial yang sangat mahal, yaitu tatanan sistem sosial yang dibangun sepanjang sejarah Poso menjadi rusak, lebih hancur dibanding dengan harta benda.

Rusaknya sistem sosial tersebut dapat saja dianggap sebagai sintesis dari antitesis (hasil dari kekerasan), meskipun sintesis kemudian berdialektika lagi menjadi tesis, tetapi membutuhkan waktu sangat panjang untuk merefleksi eksistensi kebudayaan, tetapi tak ada jaminan bahwa elemen-elemen sosial yang rusak tersebut dapat kembali dalam bentuk aslinya, meski telah terjadi gesekan-gesekan dengan elemen lain, tetapi masih dalam bentuk dasar tatanan masyarakat Poso yang terintegrasi melalui tradisi *sintuwu*

maroso. Apapun argument-asinya Coser menjadi benar bahwa konflik harus tetap dalam bingkai integratif, tapi realitas yang terbangun di Poso konflik telah melewati tahap terakhir, peperangan

Masyarakat kemudian kembali mengawali hari-demi harinya di Poso dengan kondisi yang selalu mencekam, penuh ketidakpastian, namun dibalik semua fenomena tersebut, optimisme juga terbangun melalui jaringan-jaringan sosial antar masyarakat dan hal itu dapat dilihat dari bergairahnya mereka menatap para pembeli menjajakan barang dagangannya, tanpa kecurigan, walau dibalik itu terdapat kekhawatiran, akankah konflik muncul lagi dan akan mengungsi atau bertemu dengan pembeli ini dalam kondisi yang berbeda.

Mereka saling yakin hal itu tidak terjadi lagi, mereka telah berdamai, seperti semboyan perdamaian Poso "torang samua basudara" bukan karena melimpahnya aparat di Poso, bukan pula karena para aktivis kemanusiaan bekerja melakukan program-program perdamaian, tetapi karena mereka lahir bukan untuk kekerasan, tapi demi perdamaian. Hari ini dan selanjutnya, komunitas Islam Poso tidak lagi menjual pesan-pesan masjid, tapi pesan rasul suci mereka, Muhammad SAW. Komunitas Kristen juga tidak lagi menjual pesan-pesan gereja, tapi Pesan juru selamat mereka, Kristus. Pesan Perdamaian.

### **Meliterisme dan Konflik**

Tuntutan agar dalam tubuh militer dilakukan pembaharuan, begitu kuat, hal tersebut berkaitan, tidak hanya dalam hal sikap profesional mereka dalam tugas, terutama dalam menyikapi kondisi masyarakat yang sedang berkonflik, sikap mereka yang sering melihat wilayah sebagai peluang bisnis dan politik dianggap sebagai salah satu problem institusi tersebut. Permanennya konflik di wilayah yang pernah dilanda

kekerasan dianggap sebagai salah satu upaya militer mempertahankan eksistensinya ditengah pergulatan ekonomi politik. Arianto Sangaji mengatakan bahwa

"Sulitnya melakukan audit bagi insititusi aparat keamanan, termasuk militer merupakan problem tersendiri di wilayah konflik. peredaran senjata yang bersifat ilegal, promosi jabatan dan anggaran aparat keamanan bagi pengamanan konflik dapat saja dipahami sebagai kondisi tertentu yang memperparah situasi di wilayah konflik, apalagi semua itu tidak pernah dilakukan audit. Karenanya memahami bahwa konflik Poso sebagai konflik etnoreligius menjadi tidak menyelesaikan masalah, sebab disitu juga harus dilihat bahwa ada aparat keamanan (militer) bermain"<sup>9</sup>

Kondisi negara hanya mampu menyediakan anggaran yang minim bagi kepentingan operasionalisasi dan kesejahteraan aparat, (militer) menjadi alasan utama mengapa institusi tersebut masih menjalankan praktek bisnis. Sementara tuntutan publik menginginkan adanya sistem audit yang sistematis bagi semua aktivitas aparat keamanan, seperti, operasional lapangan, pembelian peralatan, pembinaan personil dan peningkatan kesejahteraan.

Memahami bahwa kondisi keuangan negara sangat terbatas. Hanya memungkinkan anggaran militer dan Polri dinaikkan sebesar 1,5 persen dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia (Kompas 22 November 1999) Dengan demikian dana yang disiapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya sebesar 10,9 trilyun, jumlah tersebut jelas tidak mencukupi kebutuhan institusi itu jika dibandingkan dengan besarnya organisasi beserta tugas-tugas yang mereka kelola.

<sup>9</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005.

Problem utama di institusi militer dan Polri dalam hal tidak efektifnya anggaran, adalah persoalan korupsi internal mereka, belum lagi masalah bisnis militer dan Polri yang melibatkan institusi ini baik secara langsung, maupun tidak langsung telah menyebar ke wilayah konflik. Olehnya "legitimasi" militer atas kekerasan yang terjadi sering dikaitkan dengan isu korupsi dan bisnis mereka, dalam skala mikro maupun makro. Desakan agar militer menghapus anggaran non budgeter dan merubahnya dalam bentuk dana budgeter masih membuat keberatan Sementara lembaga-lembaga pemberi pinjaman menyerukan, perlunya dilakukan audit terhadap dana non budgeter militer (Kompas 2 Juli 2000).

Mekanisme pengelolaan keuangan di tubuh militer dan polri, sangat tidak transparan walau dana yang diperoleh berasal dari berbagai yayasan, koperasi dan perusahaan yang berada dibawah kendali institusi itu. Fenomena penegakan supremasi hukum terhadap berbagai tindakan korupsi berkaitan dengan problem kekerasan, khususnya di wilayah konflik, menjadi isu utama yang secara signifikan memiliki tali-temali dengan bisnis militer, hal ini juga berhubungan dengan penghentian kekerasan. peristiwa kekerasan yang terjadi di masyarakat, pasca konflik sering dihubungkan dengan melebarnya sayap institusi militer atau yang berkaitan dengan itu, sebagai institusi maupun perorangan. Maraknya bisnis militer di wilayah konflik Poso bagaimana dikatakan oleh Edmund bahwa

"di zona-zona kekerasan Poso, mereka begitu dominan menguasai hial bumi masyarakat, sebab pelaku bisnis dari pihak sipil tidak ada yang berani masuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi yang tidak aman. Akibatnya nilai jual barang ditentukan oleh mereka, bahkan zona-zona kekerasan di Poso dimana pernah terjadi teror bom, mutilasi, dan

pembunuhan, layaknya dipahami sebagai wilayah daerah yang berhasil dalam pertanian"<sup>10</sup>

Fenomena bisnis militer dalam konteks makro, Di era Presiden Abdurrahman Wahid, beberapa langkah strategis dilakukan, salah satunya menaikkan anggaran militer dan Polri, langkah awalnya, di institusi Komando Pasukan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Agus Wirahadikusuma (AWK) panglima Konstrad saat itu, memulai upaya ini. Kegagalan AWK salah satunya adalah terbatasnya waktu, hanya sekitar empat bulan. Meski demikian, ia dianggap telah melakukan terobosan, dimana selama ini belum pernah terjadi. Jangka waktu demikian, jelas terlalu singkat, apalagi melakukan pekerjaan rumit, penuh resiko dan melibatkan banyak pihak (Tempo 7-13 Agustus 2000) Dalam hal pengelolaan dana yayasan yang berada dibawah naungan Kostrad, Harold Crouch, (Kompas 20 oktober 2000). mengatakan bahwa,

"terlihat betapa mudahnya pimpinan mengambil uang di bank tanpa perlu mempertanggung jawabkan untuk apa uang itu akan dipakai, bisa saja uang itu dipakai untuk yang baik bisa pula dipakai untuk sesuatu yang buruk. Bukan tidak mungkin uang sebesar itu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Tentunya ini sangat berbahaya".

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi terjadinya penyelewengan keuangan di Departemen Pertahanan dan keamanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, (Mabes TNI) terutama pada yayasan-yasasan yang berada dibawah kendalinya. (Bisnis Indonesia 2 September 2000) Langkah-langkah pemberantasan korupsi di jajaran TNI Polri oleh Abdurrahman wahid dan Agus Wirahadikusuma, mengalami

<sup>10</sup> Wawancara di Palu, 12 Pebruari 2006

hambatan akibat kuatnya arus yang mereka hadapi.

Sorotan dan kritik atas praktek-praktek bisnis militer telah lama dipersoalkan, di era Orde Baru kritik tersebut juga pernah dilontarkan meski dengan intensitas yang lebih "santun". Kuatnya dominasi Presiden Soeharto melindungi institusi militer membuat kritik tersebut tidak begitu serius. Desakan kuat dari publik muncul, ketika era reformasi pertama kali digulirkan, Habibie sebagai pengganti Soeharto, memulai langkah strategis, ia mengeluarkan berbagai langkah kebijakan dalam pemerintahannya, seperti, pencabutan izin Hak Pengelolaan Hutan PT Yamaker, perusahaan rekanan swasta dibawah naungan Departemen pertahanan dan keamanan. Izin HPH tersebut menyangkut konsesi pengelolaan hutan di Kalimantan Barat seluas 843.500 ha dan di Kalimantan Timur dengan luas mencapai 265.000 ha., tahun 1999 militer telah menguasai hak pengelolaan hutan sebanyak dua juta hektar (Kontan 3 Mei 1999) Melihat data tersebut berarti Militer termasuk institusi yang menguasai izin penebangan hutan cukup luas.

Upaya menjawab kritikan atas praktek-praktek bisnisnya, institusi ini berargumentasi bahwa, hal tersebut dilakukan akibat minimnya anggaran yang mereka terima, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Fachrul Razi mengatakan bahwa : "Kegiatan bisnis bukan untuk membiayai program kegiatan yang bersifat operasional pertahanan, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prajurit. Tanpa bisnis pun TNI akan *survival*, asalkan dukungan anggaran dari negara memadai" (Republika 16 Januari 2000).

Bisnis militer yang diklaim untuk membiayai kesejahteraan para prajurit sebagaimana yang dikatakan oleh Fachrul Razi di atas, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya institusi untuk membiayai

sebagian kebutuhan operasionalnya... (Kompas Cyber Media, 17 Oktober 2000) Pembiayaan operasional yang diambil dari keuntungan perusahaan yang dikelola oleh yayasan dibawah naungan aparat keamanan militer dan Polri, bukan tidak boleh, hal tersebut dapat saja dilakukan mengingat anggaran untuk itu memang sangat minim, namun pengelolaan dana tidak memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, teraudit secara benar dan legal.

Penggunaan anggaran tersebut tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip supremasi sipil, namun lebih pada upaya penegasaan atas hak-hak militer dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tentu saja memiliki dampak luas dalam proses pelembagaan hak-hak sipil, dan tidak jarang terkait antara bisnis tersebut dengan fenomena konflik yang terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Poso.

Hal lain yang juga sebagai faktor pendorong berkembang pesatnya bisnis militer, kuatnya institusi teritorial di daerah daerah, sebab tidak jarang pimpinan TNI memiliki hubungan kerja sama dengan pimpinan daerah bersangkutan. Sehingga kesulitan untuk memberi peluang bisnis militer dalam hal-hal yang terbatas sangat sulit. Beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah dimana militer memiliki wilayah teritorial, memberi gambaran cukup jelas. Kontribusi pejabat-pejabat sipil di daerah pada dasarnya juga memberi sumbangan dalam hal menguatnya bisnis militer. Harold Crouch (Kompas Cyber Media 19 Oktober 2000) 'mempersoalkan bisnis militer ini sebab menurutnya, pengelolaan bisnis tersebut dapat menciptakan distorsi dalam perekonomian'.

Terdapat kecenderungan TNI memakai keistimewaan yang dimilikinya guna melakukan transaksi bisnis. Fenomena bisnis militer telah memasuki tahap mengkhawatirkan, mereka memanfaatkan situasi konflik yang terjadi dalam masyarakat

untuk berbisnis dengan cara menjual peluru-peluru pada pihak yang bertikai. Bahasan tentang hal ini akan dikaji lebih jauh dalam sub bab selanjutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan di lima Komando Daerah Militer, (Kodam) mengatakan bahwa selain, berpolitik orang militer juga banyak menguasai lahan-lahan bisnis yang seharusnya bisa dimiliki dan dikerjakan oleh sipil. (Media Indonesia 30 Januari 2001) Berbagai tindakan bisnis militer dan Polri banyak ditentang oleh sipil, karena dikhawatirkan memiliki kecenderungan untuk mendistorsi pasar. Logika pasar (ekonomi) tidak sekedar diserahkan pada mekanisme pasar yang bebas dan sehat namun, terdapat tangan-tangan tersembunyi (pengatur pasar) akan lebih berfungsi efektif jika dibelakangnya terdapat kepalan-kepalan yang tersembunyi. Klaim demikian memberi gambaran bahwa kekuatan pasar dan para professional yang bekerja untuk tujuan ekonomi, menjadi sangat kuat ketika terjadi persentuhan dengan mereka yang memiliki kekuasaan.

Lemahnya kontrol sipil terhadap berbagai perilaku ekonomi politik militer dan Polri, merupakan salah satu faktor berkembangnya bisnis tersebut, tidak terdapatnya institusi-institusi sipil yang bekerja dengan baik, menjadi salah satu faktor lemahnya sipil berhadapan dengan institusi keamanan. Sementara pengelolaan bisnis yang dilakukan secara sistematis, dengan memakai garis komando, sebagaimana yang terdapat di militer dan Polri, mulai dari Markas Besar sampai institusi di terkecil, Babinsa atau Polsek, sampai pada lapisan bawah yang bersifat personal.

Dalam hal bisnis, hubungannya dengan militer, Ichsan Malik memberi kesimpulan bahwa beberapa fenomena yang muncul dalam hal terlibatnya bisnis militer. "Pertama, terjadinya kolusi antara militer dengan pengusaha Cina dan asing kedua. Muncul korupsi yang masif dari tingkat prajurit hingga

jenderal, ketiga,. muncul nepotisme, yakni bahwa selain bisnis dilakukan oleh pribadi perwira, juga dilangsungkan keluarganya, (Wacana Edisi 17 Tahun III 2004).

Bisnis militer di daerah konflik Poso khususnya yang bersifat ilegal, salah satu bentuknya adalah, perdagangan senjata organik, baik yang berbentuk laras panjang maupun laras pendek. Serta berbagai bentuk amunisi. Peredaran senjata api di Poso di masa konflik selain berasal dari militer juga bagi pihak-pihak yang bertikai mendapat pasokan dari luar Poso. Wawancara dengan informasi yang dihimpun selama penelitian dilakukan memberi kesimpulan bahwa, harga sebuah senjata api yang diperdagangkan secara ilegal biasanya dalam bentuk penyewaan,. jika senjata jenis SS 1 buatan PT Pindad disewakan perhari sebesar Rp. 150.000, jenis MK 3 dan RPD disewakan Rp. 350.000,- perhari. Ketika konflik terjadi aparat keamanan dikirim untuk memberi rasa aman pada masyarakat, dalam perkembangan di lapangan beberapa aparat juga menjadi bagian dari problem keamanan. Seringkali aparat membagi-bagikan amunisi berbagai jenis kepada kelompok-kelompok yang bertikai<sup>11</sup>.

Pembagian ini tidak dilakukan secara gratis, mereka yang ingin memperoleh senjata tersebut, diharuskan melakukan transaksi pembayaran, transaksi itu tidak hanya berupa uang, dapat juga dibarter dengan barang lain. Seperti tanduk rusa atau ayam kampung dianggap merepresentasi nilai tukar senjata. Hal itu terjadi, karena di Poso pada masa konflik uang yang beredar sangat sulit, masyarakat jauh dari kehidupan normal, jarang terjadi transaksi perdagangan sebagaimana dalam situasi normal, akibatnya, pilihan terhadap barang yang tersedia menjadi

---

<sup>11</sup> Beberapa informan yang diwawancarai berkaitan dengan bisnis aparat keamanan di Poso memberi kesimpulan demikian.



alternatif barter. Harta orang kampung tersebut sering dijadikan sebagai alat barter dengan peluru. Oleh sebab itu, indikasi bahwa militer memainkan peran dalam eskalasi konflik yang mapan, menjadi argumentatif. Arianto Sangaji mengatakan bahwa

“Aparat keamanan secara personal diuntungkan, dengan adanya konflik Poso. Hal itu diperoleh melalui adanya bisnis-bisnis yang sifatnya kriminal, kegiatan kriminal ekonomi, macam-macam, ilegal logging, penjualan senjata api atau amunisi secara ilegal, pungutan-pungutan di Poso penjualan. Itu kan keuntungan yang sifatnya personal. kekerasan pasca Deklarasi Malino yang sifatnya tertutup mengundang tanda tanya. Ketika aparat keamanan gagal mengungkap siapa pelakunya, malah disitu mengundang kecurigaan, jangan-jangan aparat sendiri juga menjadi bagian dari kekerasan<sup>12</sup>”

Amunisi dan persenjataan dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi pasca Deklarasi Malino tidak hanya yang dirakit oleh warga yang berkonflik melalui bengkel-bengkel yang dirubah menjadi “industri” perakitan senjata, namun amunisi dan senjata tersebut salah satunya dibuat oleh PT Pindad, laras panjang 5,56 mm juga colt 3,38 atau FN kaliber 9 secara organik di Indonesia, dimiliki oleh TNI Polri, penjualan senjata api tersebut oleh negara pembuatnya begitu ketat, terutama senjata dengan jenis tempur. Salah seorang Informan bernama Ali mengatakan bahwa :

“Selama kekerasan saya lebih banyak tinggal di Poso, dan untuk jaga-jaga saya mempersiapkan senjata api rakitan, sementara pelurunya saya peroleh dari aparat keamanan jumlahnya puluhan. Namanya juga untuk jaga-jaga kalau-kalau kekacauan masuk di kompleks rumah saya. Tapi selama semasa konflik saya tidak

pemah menggunakan senjata dan peluru itu, namanya saja untuk jaga-jaga<sup>13</sup>”

Aparat keamanan menjadi pemasok utama senjata api dan amunisi ke masyarakat yang berkonflik, dengan motif bermacam macam, seperti, solidaritas etnis, suku, agama maupun kekeluargaan. Selain itu ada juga yang mengais keuntungan. Fenomena peredaran senjata api di Poso juga mendapat pengakuan dari pihak Kepolisian Daerah Poso Sulawesi Tengah motifnya juga seperti yang dijelaskan tadi. Namun, dari sekian motif yang melandasi aparat keamanan membagikan amunisi ke masyarakat yang sedang berkonflik, motif ekonomi atau bisnis sangat dominan, Sangaji (2005 :16) mengemukakan bahwa :

“Seorang sumber di Poso mengakui bahwa Maret 2001 ia pernah ditawari sepucuk M16 Ai dengan harga 7 juta rupiah SS-1 5 juta rupiah, FN-45 seharga 2,5 juta, jika setuju sipenawar akan menghubungkannya dengan sebuah sumber anggota militer. Sumber ini mengakui sebelum Deklarasi Malino, Desember 2001 sipenawar seperti salesman menja-jakan barang-barang itu ke Kota Poso, ia meyakini sejumlah orang di Kota Poso karena terbawa oleh situasi “perang membeli senjata-senjata itu entah dipakai untuk menyerang lawan atau karena pembelaan diri”.

Bisnis senjata api di Poso selama konflik menyiratkan satu fakta bahwa, dalam kondisi normal saja motif ekonomi tersebut merupakan transaksi yang menguntungkan, apalagi di masa konflik dimana setiap orang berupaya melindungi diri dari tindakan yang dapat membuatnya celaka. Maraknya bisnis tersebut berdampak pada proses transformasi konflik. Awal konflik kekerasan yang terjadi masih bersifat terbuka. Pasca Deklarasi Malino sifatnya menjadi tertutup dan misterius. Klaim

<sup>12</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

<sup>13</sup> Wawancara di Poso 29 Februari 2006

bahwa masih terjadinya kekerasan di Poso dapat dihubungkan dengan berkembangnya bisnis militer dan polisi di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang diuraikan oleh Aditjondro (2004 : 168). Mengemukakan bahwa :

“Kejadian di Sekolah Polisi Nasional (SPN) Karombasan Manado penjaga gudang amunisi di sana dilaporkan pernah menjual amunisi seharga 1.000 rupiah per biji kepada agen-agen kemudian berpindah tangan dari pembeli dari Tana Poso sebesar 2000 rupiah sampai 2.500 rupiah setelah mengangkutnya ke Poso, harga peluru itu melonjak menjadi 3.000 – hingga 5000 rupiah, bahkan bisa sampai 7.500 rupiah jika situasi tegang sekali”

Peristiwa kekerasan di Poso sering dihubungkan dengan eksistensi aparat keamanan di wilayah tersebut, berbagai kasus seperti penembakan dan pembunuhan, mutilasi menjadi peristiwa yang sangat misterius, dimana pelaku peristiwa tersebut banyak yang tidak terungkap dan motif di belakang peristiwa itu juga menjadi tanda tanya Adnan Arsal mengatakan bahwa : ” Aparat kepolisian yang begitu banyak tidak mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap berbagai tindak kekerasan yang terjadi selama ini, atau jangan-jangan yang kita cari ada didalam saku kita sendiri”.<sup>14</sup>

Awal konflik serangan yang dilancarkan oleh dua komunitas yang bertikai, Islam dan Kristen dilakukan secara terbuka, kekerasan umumnya terjadi secara berhadap-hadapan, penggunaan senjata juga dari jenis senjata tradisional seperti, Panah, pisau, tombak, parang, papporo<sup>15</sup> dan senjata rakitan lainnya. Pasca Deklarasi Malino Desember 2001 terjadi transformasi jenis kekerasan, penggunaan senjata tradisional ke senjata api.

Kualifikasi tempur yang biasa dipergunakan oleh militer maupun senjata rakitan yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Jumlah korban akibat penggunaan amunisi organik dalam kekerasan tersebut, lebih banyak dibanding ketika pemakaian senjata tradisional masih dominan. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Poso sehubungan dengan situasi konflik dengan menggunakan amunisi peluru yang biasa dipergunakan oleh aparat keamanan, berjenis laras panjang ukuran 5,56 mm atau coll 3,38 mm atau FM kaliber 9 itu secara organik diperuntukkan bagi pasukan TNI dan Polri. Rudi, meski demikian penggunaan senjata api menjadi sulit pelacakannya sebagai akibat dari peredarannya yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu, sipil juga memiliki potensi dalam hal penggunaannya.

Peredaran senjata api menjadi begitu meluas dan tidak terkontrol, sebagai akibat transaksi bisnis di sektor tersebut sangat menguntungkan sehingga menurut menurut Wezeman (Arianto sangaji 2005 : 4). terdapat dua hal penting dalam kaitannya dengan perdagangan senjata api secara ilegal,

“Pertama sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan produsen senjata,. Terutama karena lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir pembuatan senjata bisa dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari produser, Kedua dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak, diantaranya pejabat pemerintah yang korup, dialer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial dan orang-orang yang terkait dengan transportasi dan penyeludupan senjata”.

Penguasaan pasar senjata api, baik oleh para pedagang yang bergerak di sektor itu maupun para pejabat, sipil maupun militer

<sup>14</sup> Wawancara di Palu tanggal.

<sup>15</sup> Senjata panah peluncur yang berisi paku-paku kecil dan bahan korek api .

memiliki arti, bagi pedagang atau perantara, bisnis ini sangat menguntungkan dari segi profit, sementara bagi para pejabat, disamping laba dari bisnis tersebut juga dapat diraih, keuntungan politis juga ikut serta. Ketika eskalasi konflik meluas, dimana penggunaan senjata api telah menjadi bagian dari kekerasan, dari situ bisnis ini akan merebak, pengaruh suasana perang mendorong kelompok-kelompok yang bertikai untuk memiliki perlengkapan yang lebih efektif pemakaiannya. Senjata dengan jenis sederhana, seperti senjata tradisional yang dipakai dalam konflik dapat berakibat fatal bagi kelompok tersebut, karena dalam situasi perang, tujuan utama yang harus dicapai, adalah bagaimana korban dari pihak lawan dikalahkan. Alat peperangan yang lebih modern, bisa berarti kemenangan di kelompok yang menguasai senjata tersebut.

Konflik yang memunculkan kekerasan, berarti penggunaan kekuatan militer dan polisi dibutuhkan untuk mengatasi aksi kekerasan, aparat keamanan dan para politisi sipil dapat menarik keuntungan besar. Keuntungan pertama berbentuk materil, kekerasan dalam eskalasi yang meluas juga berarti menggunakan dana yang sangat besar untuk itu. Minimnya anggaran yang diberikan dianggap menjadi salah satu faktor aparat keamanan ikut terlibat dalam bisnis ilegal, dari yang terkecil misalnya terjadinya pungutan pada pos penjagaan. mereka yang melewati pos tersebut jika tidak membawa kartu identitas akan dikenai pungutan biasanya minimal 5.000 rupiah perorang.

Segi politisnya, bagi beberapa pihak dari kalangan militer dapat dipakai sebagai ajang promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika keuntungan bersifat personal diperoleh melalui bisnis-bisnis ekonomi ilegal, seperti *elegal logging*, penjualan senjata api dan amunisi dibawah tangan. Maka keuntungan promosi jabatan menurut Sangaji bahwa "banyak pejabat yang memperoleh promosi

dengan adanya kerusuhan Poso. seperti di tingkat Komando Distrik, Kepolisian Resort, begitu juga dengan level-level berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa Poso merupakan wilayah ajang kekerasan".<sup>16</sup>

Promosi jabatan dengan memakai Poso sebagai ajang kekerasan memiliki kaitan yang kuat bagi terciptanya kekerasan, jika pejabat lokal berhasil mengatasi situasi tersebut, maka terbuka peluang bagi mereka untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, atau ditawarkan jabatan yang cukup strategis, karena Pejabat tersebut dianggap memiliki kemampuan dan cakap dalam tugas,. Hal lain yang dapat dinikmati oleh para pejabat yang dipromosi, bahwa mereka memperoleh pengaruh luas dalam masyarakat, sehingga penciptaan situasi yang diinginkan dapat terjadi. Realitas demikian, membuka peluang bagi penciptaan kekerasan lebih terbuka.

Penggunaan senjata api, organik maupun rakitan oleh warga yang bertikai, dipandang sebagai salah satu tindakan efektif, baik sebagai mekanisme defensif dalam arti pertahanan diri dari serangan maupun sebagai upaya ofensif, atau penyerangan terhadap lawan, tindakan penguasaan senjata api secara ilegal oleh warga dalam situasi kekerasan, berdampak pada semakin meluasnya eskalasi konflik. Penguasaan senjata api dapat mendorong mereka yang pernah menjadi korban konflik untuk melakukan pembalasan. Ironisnya aparat keamanan terkadang memberi "legitimasi" bahkan "menganjurkan" penguasaan senjata bagi masyarakat dengan jalan menjual atau barter, juga dengan cara meminjamkan.

Peristiwa yang dialami oleh seorang kepala desa di kecamatan Lage, Poso, mengindikasikan bahwa bagaimana aparat keamanan, dalam hal ini, komandan komando daerah Militer (Kodim) 1307 Poso saat itu, Syamsu Rizal Harahap, saat mengunjungi

<sup>16</sup> Wawancara di Pslu tanggal 10 Desember 2005

desa yang menjadi korban kekerasan itu, menganjurkan kepada warga desa agar mempersenjatai diri, semata hanya untuk melakukan pembelaan.

Aparat keamanan tidak mampu memberi perlindungan maksimal terhadap warga sipil dalam situasi konflik selama ini penguasaan senjata api oleh mereka sebagai bentuk ketidak yakinan warga sipil. terhadap jaminan keselamatan yang dipercayakan kepada aparat keamanan. Militer atau aparat keamanan merupakan *part of problem* dalam fenomena konflik Poso, menandai satu perjalanan panjang dari konflik tersebut. Kajian konflik juga harus menyertakan aparat keamanan sebagai unit analisis, sebab, data-data lapangan menunjukkan bahwa Peristiwa kekerasan di Poso langsung melibatkan aparat keamanan, pembunuhan, penembakan, penculikan di Desa Toyado wilayah Poso, dilakukan oleh kompi B dari Yonif 711 Raksatama. Yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2001 Hal itu menunjukkan, bahwa aparat keamanan merupakan *part of problem* dari kekerasan di Poso.

Kekerasan di Poso bukan hanya tentang konflik tertutup yang selama ini bisa dikekang. Fenomenanya menjadi berkepanjangan, setiap ada upaya penghentian, kemudian kekerasan muncul lagi. Penghentian ternyata tidak lebih sekedar untuk jeda, kemudian berlanjut lagi saat dirasa telah cukup amunisi dan perlengkapan lainnya, Konflik tak hanya sekedar kesalahan masyarakat sipil, dimana terlihat sistemnya yang sangat rapuh dalam ketika ini mempertahankan jati diri sebagai entitas salah satu entitas. Kekerasan terjadi juga dipandang sebagai upaya yang berhasil dari para provokator mengakumulasi semua potensi masyarakat diolah dan melahirkan konflik antar warga.

Awal kejadian konflik, para provokator yang bekerja di aras penciptaan konflik, berasal dari mereka yang menerima order

politik, pengumpulan massa sebagai upaya *pressure* kepada lawan. Bahwa kelompok-kelompok intelejen juga ikut memainkan peran. Para politisi sipil yang bekerja menghubungkan satu demi satu wilayah yang selama ini tidak pernah terkonsolidasi menjadi berhasil. Ketika broker sipil kemudian “mewariskan” praktek mediasi kekerasan ini ke aparat keamanan, mereka kemudian menjadi bagian dari problem, sebab dalam aras konflik, mereka disamping mencitrakan diri sebagai “pasukn penjaga perdamaian” juga citra sebagai pebisnis ikut melekat.

Profesi broker yang disandang oleh politisi sipil yang bermain di atas politik praktis, kemudian dimbil alih oleh aparat keamanan. Perbedaannya, pihak terakhir ini lebih memilih cara-cara bisnis daripada politik. Tindakan-tindakan sebagai broker terlihat jelas pada perilaku mereka dalam mengantisipasi kekerasan yang terjadi, baik sebagai penciptaan awal konflik maupun penataan kekerasan secara permanen. Arianto sangaji mengatakan bahwa :

“Terjadinya kekerasan merupakan proses delegitimasi atau pembusukan terhadap demokrasi dengan melaku-kan serangkain kekerasan disejumlah wilayah yang mudah untuk di eksploitasi, dengan cara membagi-bagikan amunisi, penjualan peluru, pejata api ataupun menyewakan kemasyarakatan dengan berbagai jenis seperti, senjata SS-1 buatan PT Pindad yang disewakan perhari 150.000 rupiah, senjata MK-3, senjata mesin RPD disewakan perhari sebesar 350.000 rupiah, Hal itu harus dilihat sebagai upaya agar kekerasan kekerasan terus berlanjut padahal aparat keamanan dikirim ke daerah konflik untuk menormalkan situasi.”<sup>17</sup>

Terlibatnya aparat dalam hubungannya dengan semakin menajamnya eskalasi konflik Poso, juga terlihat dalam peristiwa

<sup>17</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

pembantaian warga Buyungkatodo. kejadian yang menandai masuknya Poso dalam peristiwa konflik jilid ke empat, dimana aparat militer dari kompi 714 ikut dalam aksi penyerangan. Bersama.. Sementara peristiwa pembantaian di Kilo Sembilan (Desa Sintuwulemba) tempat pesantren wali Songo berdiri, juga terdapat indikasi keterlibatan aparat, dari berbagai keterangan yang dihipun menunjukkan bahwa aparat juga memainkan peran penting dalam peristiwa tersebut. Iskandar Lamuka mengatakan bahwa seorang warga yang selamat menuturkan kepadanya bahwa

"saya berada dalam air (sungai) selama berjam-jam, setelah situasi saya anggap aman, maka saya berlari menuju ke kompi, tiba ditempat tujuan saya terkejut sebab salah seorang yang berada di sana, juga ikut terlibat melakukan penyerangan, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kodim, disana saya melihat orang yang terlibat dalam penyerangan juga berada disitu, Sayapun memutuskan untuk tidak minta perlindungan di Kodim dan berlari mencari tempat yang aman<sup>18</sup>

Peristiwa atau kasus penyerangan yang terjadi tanggal 12 Agustus 2002, di desa Batugencu, kecamatan Lage, Sekretaris Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) menuding serangan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini pasukan Brimob terlibat dalam penyerangan, menurut mereka, 17 anggota pasukan Brimob terlibat, setelah serangan ditemukan banyak slongsong peluru dari senjata organik. Penggunaan senjata api sejak Mei 2000 saat Poso masuk dalam konflik jilid tiga telah marak terjadi beberapa kasus pembantaian di desa Sintuwulemba, pihak aparat keamanan memainkan peran sebagai orang yang melakukan serangan, dari beberapa korban yang ditemukan terdapat mereka yang

meninggal akibat terkena senjata api, peristiwa didesa Sintuwulemba merupakan salah satu kejadian, dari bergitu banyak peristiwa kekerasan di Poso dengan penggunaan senjata api.

Peristiwa yang ditandai dengan penggunaan senjata api dan ledakan bom yang dimulai sejak 17 April 2000 sampai dengan 8 agustus 2005, berjumlah sekitar 145 ledakan. belum termasuk kejadian berikutnya seperti terjadinya ledakan bom di Pasar Babi Kelurahan Maesa Palu sehari menjelang perayaan tahun baru 2006, sekitar delapan orang tewas dan mencederai puluhan pengunjung pasar. terjadinya penembakan terhadap kepala Kepolisian Resort Poso, dari jarak yang sangat dekat<sup>19</sup>, menggunakan senjata api dan bom masih cukup banyak yang tidak sempat tercatat jumlahnya.

Saat ketegangan kian meningkat, antara komunitas Islam dan Kristen, persediaan amunisi tak pernah habis, bahkan semakin banyak, para "pedagang" yang bermunculan secara tiba-tiba menawarkan barang dagangannya berupa peluru organik untuk dipakai dalam senjata yang digunakan oleh para laskar dikedua belah pihak. Eskalasi kekerasan juga dikesankan bahwa aparat keamanan berpihak disalah satu kelompok. Tetapi "keberpihakan" itu terjadi didua komunitas yang bertikai,. Nampaknya sindikat perdagangan perlengkapan perang. menemukan momentumnya di Poso ketika konflik sedang berkecamuk.

Penemuan sekitar 5.000 butir peluru di eks lokasi MTQ di kota Palu. Polisi berhasil menangkap Siswanto Ibrahim, pelaku merupakan residivis yang tertangkap setahun kemudian, awalnya ia ketahuan membawa satu peti berisi peluru berjumlah sekitar 2.846 dan 15 pucuk senjata api dari berbagai jenis selanjutnya penyerangan dan pembunuhan

<sup>18</sup> Wawancara di Poso tanggal 3 Desember 2005

<sup>19</sup> Korban selamat dan peluru tak sempat mengenai tubuhnya.

yang terjadi di beberapa desa di wilayah Poso mempergunakan jenis peluru yang biasa dipakai oleh aparat keamanan. Seperti yang terjadi di desa Mayumba, didesa tersebut bahkan ditemukan lagi satu peti dengan kapasitas 1.400 butir peluru buatan PT Pindad.

Keterlibatan beberapa pihak yang memiliki kepentingan agar Poso tetap dalam pola dan eskalasi konflik yang bertahan, pada dasarnya terdapat harapan dari para pelaku dengan beberapa target kepentingan, terutama pada sisi ekonomi politik. Informan bernama Iskandar Lamuka, mengatakan bahwa “terjadinya beberapa peristiwa kekerasan yang berulang-ulang dan tidak dilakukan upaya hukum yang jelas, menunjukkan bahwa dalam beberapa kekerasan yang terjadi di Poso, aparat jelas terlibat dalam kasus-kasus kekerasan tersebut”<sup>20</sup>

Danrem 132 Tadulako Kol (inf) M. Slamet dan kapolda Sulteng M.. Taufik Ridha (Suara Pembaruan, 21 Oktober 2003), menjelaskan bahwa “bukan hanya TNI AD yang menguasai amunisi buatan pindad, tapi juga angkatan lain dan Polri. Sementara menurut kapolda aparat tak terlibat dalam kerusuhan di Poso”.

Pasca Deklarasi Malino, kekerasan dengan penggunaan senjata api masih terjadi, bahkan teror bom yang menjadi senjata pembunuh massal, namun upaya provokasi demikian tidak lagi membuat masyarakat untuk terpancing seperti konflik-konflik sebelumnya, Iskandar Lamuka mengatakan bahwa

“daya tahan masyarakat cukup kuat untuk membendung isu-isu yang provokatif, namun jika terjadi konflik dengan skala besar terjadi lagi maka pekerjaan perdamaian yang selama ini dilakukan akan hancur, dan Poso akan diberlakukan darurat sipil atau militer,

sebab itu juga sudah menjadi wacana apalagi Inpres Nomor 14 tahun 2005 hanya berlaku selama 3 bulan dan diperpanjang lagi dan kalau inpres itu tidak efektif pemerintah dapat saja mengambil jalan lain untuk memulihkan keamanan”.<sup>21</sup>

Teror bom, pembunuhan dan berbagai bentuk kekerasan lain, telah mematangkan sikap warga, mereka selektif dengan berbagai isu berbentuk provokatif. Isu dan teror yang berlangsung secara sistematis tersebut, perlahan-lahan tidak terdengar lagi. Namun demikian warga Poso pada dasarnya masih dalam tahap *colling down* (menahan diri) untuk tidak terpancing terhadap berbagai bentuk pertikaian, Wilayah Poso juga menunjukkan iklim kondusif untuk perdamaian. Peristiwa itu sesungguhnya mengantar dan mengembalikan Poso pada situasi konflik, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum diadakannya deklarasi Malino yang mempertemukan dua kelompok yang bertikai.

Fenomena menarik dari peristiwa tersebut, jika awal-awal terjadinya konflik masyarakat begitu mudah terpancing oleh tindakan-tindakan provokatif meski dengan peristiwa sederhana, seperti perkelahian antar pemuda desa. Maka saat ini, kejadian dengan aksi-aksi penembakan dan bom, yang ditandai dengan jatuhnya korban cukup banyak, masyarakat sesungguhnya telah memiliki mekanisme pertahanan diri sebagai upaya keluar dari situasi ranah konflik. Pengalaman konflik benuansa etnoreligius yang cukup panjang sejak 1998 sampai dengan dicituskannya deklarasi Malino bahkan sampai saat ini, telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat Poso untuk tidak lagi mengulangi kejadian serupa.

Peristiwa bom di Pasar Tentena bagi masyarakat setempat menyimpan cerita menarik, bagaimana salah seorang ibu ibu dilarang oleh anak angkatnya perge ke Pasar,

<sup>20</sup> Wawancara di Poso tanggal 3 Desember 2005

<sup>21</sup> Wawancara di Poso tanggal 3 Desember 2005.

sang ibu mengabaikan larangan tersebut salah satu Korban ledakan adalah ibu angkat tadi. Operasi intelijen memainkan peran dalam peristiwa tersebut. Isu tentang beredarnya kelompok bunga, dicurigai menjadi bagian dari tim mawar. Operasi intelijen Indonesia acap kali memakai sandi-sandi dengan nama bunga.

Setelah bom Tentena, peristiwa-peristiwa lain berbentuk kekerasan kembali menyusul. kejadian yang sangat tragis adalah peristiwa mutilasi, menewaskan tiga siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen di Poso. bernama, Ida Yarni Sambue, Theresia Mongangke, Alfita Poliwo, pada November 2005, memakai kalewang sebagai senjata. Juru bicara Markas Besar Polri Aryanto Boedihardjo mengatakan, pembunuhnya sejumlah enam orang, berpakaian hitam, dan bercadar". (Tempo 13 November 2005) Satu modus operandi pelaku provokasi kerusuhan dan pembunuhan Selang sepeken setelah peristiwa mutilasi itu, kasus penembakan terhadap dua remaja putri 17 tahun Siti dan Ivon ditembak di teras rumah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lombogia Poso Kota. Kejadian tersebut kembali memunculkan isu tentang sentimen agama.

Selang beberapa saat beredar selebaran provokatif disebar oleh kelompok Islam. Penyebaran selebaran tersebut begitu mudah. Akses masuk ke Tentena saat itu, terutama bagi komunitas Muslim sangat sulit, mereka menghindari resiko kekerasan. Lamuka, menjelaskan bahwa,

"kelompok-kelompok yang dapat diterima oleh masyarakat Tentena, seperti kelompok perdamaian, jelas bukan pihak yang melakukan aksi selebaran itu. Masyarakat Tentena menurutnya, mengklaim bahwa pelaku peredaran selebaran itu dilakukan oleh aparat militer, sebab begitu mudahnya beredar dan mereka memiliki jaringan sampai ke tingkat bawah. Peristiwa di Desa Masani

menunjukkan ada oknum militer yang terjun langsung kemasyarakat membagi-bagikan selebaran"<sup>22</sup>

Proses penyebaran yang dapat dimaknai sebagai upaya provokatif tidak dapat dipisahkan dengan cara kerja operasi intelijen dalam konflik. Setiap operasi intelijen tidak jarang mereka personifikasikan sebagai bagian dari target sasaran. mereka masuk sebagai anggota, melakukan aktifitas apa adanya, upaya tersebut dilakukan guna membongkar jaringan tersebut, operasi intelejen awalnya merupakan upaya pengungkapan kasus, ketika kasusnya menjadi tidak jelas, terjadi operasi penyusupan intel.

Seringkali mereka terjebak menjadi salah satu aktor konflik, mereka sering terlibat terlalu jauh, akibatnya sukar menarik diri keluar, akhirnya mereka menjadi bagian dari kekerasan Bekerjanya intel di wilayah konflik Poso pada dasarnya bertujuan untuk membongkar jaringan yang sedang dilacak. Dalam Operasi keamanan, insitusterdepan adalah Polisi dari kesatuan Brimob, Perintis dan militer dari Zeni Tempur, namun lembaga intelejen juga ikut beroperasi. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengumumkan bahwa dilaksanakannya operasi intelijen di wilayah Poso dan sekitarnya oleh lembaga-lembaga intelejen, seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), melakukan operasi intelijen dengan cara, salah satunya melakukan penggalangan di Masyarakat.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan eksistensi dan kehadiran aparat keamanan di Poso, Markas

<sup>22</sup> Wawancara di Poso tanggal 3 Desember 2005

<sup>23</sup> Pengumuman tersebut diberitahukan pada tanggal 15 Oktober 2003

Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan pendirian Komando Lapangan Operasi (Kolaops) saat konflik masih berkecamuk melalui kebijakan Jakarta Operasi Militer digelar dengan berbagai sandi antara lain : “Operasi Sadar Maleo tahun 2000”, “Bawah Kendali Operasi” (BKO) Polres Poso. Satuan - satuan militer yang di BKO-kan pada operasi tersebut adalah Batalyon 711 Raksatama Poso, 726 Makassar, 721 Palopo, Zeni Tempur (Zipur) Makassar dan Brimob pare-Pare, Brimob Makassar, Perintis dan Intel Polda Sulawesi Tengah.

Mobilisasi kekuatan militer dan Polri secara besar-besaran terjadi pada awal tahun 2001 dengan sandi Operasi *Sintuvu Maroso I*, disusul kemudian dengan Operasi *sintuvu Maroso II*, dan *III* jumlah pasukan yang ditempatkan begitu besar, terbesar dalam sejarah konflik Poso sejak tahun 1998 sampai dengan 2004.. Alasan penempatan tersebut, cukup argumentatif, meski telah dilakukan sebuah kesepakatan bersama oleh dua komunitas yang bertikai, Islam dan Kristen yang disebut dengan “Deklarasi Malino” Poso belum juga aman. Tindakan teror dalam bentuk kekerasan masih saja terjadi. Sehingga berbagai operasi yang diberlakukan di wilayah tersebut dianggap masih signifikan. Operasi

tersebut menghabiskan dana sebesar 2,5 Milyar perbulan. Besarnya jumlah pasukan dan dana miliaran belum mampu mengungkap berbagai kasus yang terjadi. “Sekitar 59 penembakan misterius, dengan korban 40 orang belum berhasil diungkap oleh aparat keamanan” 9Tempo 20 November 2005).

Melihat jumlah personil yang ada dibanding dengan berbagai kasus kekerasan, dapat digambarkan bahwa kehadiran aparat keamanan di Poso menjadi kontra produktif. Ironisnya, keberadaan jumlah aparat keamanan sangat besar, luas wilayah sekitar 8.712,25 km persegi, dengan prosentase 12, 81 % dari luas keseluruhan wilayah Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso dalam angka 2004) Perbandingan tersebut mencerminkan idealnya Poso tidak lagi menjadi target kekerasan, para pelaku menjadi enggan melakukan tindak kriminal, karena banyaknya aparat yang bertugas di Poso, kenyataan di lapangan, Poso masih diselimuti kekerasan. Tabel dibawah ini memberi gambaran jumlah personil TNI dan Polri yang bertugas di Poso. Tentu saja tabel tersebut merepresentase jumlah aparat yang tercatat, sementara yang tidak masuk dalam catatan administrasi, menjadi sulit ketahuan jumlahnya signifikan.

Tabel 2. Jumlah Pasukan TNI dan Polri di Poso Periode 2000-2002

Tahun	TNI	Polri	Jumlah
2000	489	832	1.321
2001	852	1.172	2.024
2002	968	2.270	3.238
2003	1.668	3.096	4.764
2004	900	3.000	3.900

Sumber Pemda Poso ,2003

Pasulakan lain di luar Polri dan Militer di Poso adalah merek yang berasal dari paramiliter. Kemudahan mereka masuk dalam wilayah konflik mengindikasikan bahwa, dalam

tubuh pasukan tersebut juga terdapt berbagai kepentingan ekonomi politik kekerasan. Dalam hal pelatihan dan pembentukan misalnya, keterlibatan terlibatnya militer, walau bukan



kebijakan resmi institusinya,, namun eksistensi mereka diketahui secara jelas, dukungan persenjataan biasanya diperoleh dari ruang-ruang gelap atau penyeludupan. Tidak pernah terjadi pengakuan formal dari kekuasaan (negara atau institusi militer) dalam hal pembentukan milisi, keterkaitan mereka dengan organisasi keamanan sesungguhnya terlihat, ketika menjadi bagian dari pertarungan kekuasaan, dapat diketahui siapa menciptakan apa dan untuk kepentingan apa. Andi Wijayanto mengatakan bahwa, "indikasi-indikasi terkaitnya militer dengan kelompok-kelompok milisi sangat nampak terlihat, salah satu ukurannya adalah ketika terjadi pengiriman pasukan milisi kewilayah konflik"<sup>24</sup>

Fenomena terlibatnya militer dan polisi pada dasarnya mengindikasikan, Poso sebagai ajang kekerasan memiliki potensi sosial, ekonomi dan politik, dimana berbagai institusi yang berkepentingan merasa terusik untuk masuk memainkan peran strategis mereka. Aparat keamanan juga merasa berkepentingan di wilayah konflik tersebut, adanya kelompok-kelompok kepentingan itu memposisikan militer dan Polri dominan.

Militer sesungguhnya melibatkan diri dalam berbagai konflik yang menajam, pada awal konflik, peristiwa itu dipicu oleh kelompok-kelompok perorangan dengan maksud tertentu, mereka melindungi eksistensi kelompoknya, berusaha mencapai kepentingan sesaat, pelaku-pelaku individual ditingkat awal dapat diidentifikasi berasal dari satu institusi yang memang pada saat itu sedang digugat eksistensinya. Di Poso pelaku awalnya berasal dari militer secara institusi yang kemudian dilindungi oleh organisasi tersebut, tidak diajukan ke peradilan, hal ini kemudian menimbulkan rasa tidak puas, diantara kelompok-kelompok masyarakat, akhirnya terjadi konflik antar kelompok. Pola penciptaan situasi sekaligus memainkan

peran tersebut, sebagai upaya strategis institusi itu melebarkan sayapnya dalam penciptaan eskalasi konflik. Infoman bernama Andi Wijayanto mengatakan bahwa

"hampir semua kasus pelaku-pelaku individual dititik awalnya diketahui, demikian juga di Poso. kasus penembakan oleh dua oknum militer di Poso di awal konflik, hal itu sengaja dibiarkan agar terjadi rutinitas yang kemudian diolah menjadi konflik sosial antar kelompok, militer memainkan peran dalam pengolahan situasi sehingga menjadi lebih besar, hal itu merupakan bagian dari penyiapan, penggalangan kondisi yang mereka harapkan akan terjadi".<sup>25</sup>

Pelatihan faksi-faksi, militer meski tidak terlibat secara langsung sebagai wujud dari pemberian otoritas khusus pihak keamanan, hadimnya mereka dalam kerangka yang ada, sesungguhnya diketahui dan dipahami oleh militer. Terutama di militer "hijau"<sup>26</sup> yang dianggap dekat dengan milisi, bahkan ikut berperan membantu pasukan para militer tersebut. Mereka terlihat cukup solid, mampu mengorganisasikan diri secara baik, kemampuan menjangkau daerah-daerah konflik cukup rapi. Hal ini terlihat dari rotasi pergerakan pasukan, berkaitan erat dengan faksi "hijau" secara personal mereka terlibat. Keterlibatan mereka pada kelompok-kelompok milisi yang diterjunkan dalam konflik Poso, sebagai bagian dari pertarungan politik di Jakarta.

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso, merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan secara nasional dimana institusi sipil dan militer memperebutkan kekuasaan politik nasional, sementara dipihak militer mereka pernah melakukan kesalahan sejarah membawa bangsa ini kearah politik otoritarian,

<sup>24</sup> Wawancara di Palu tanggal 6 Desember 2005

<sup>25</sup> Wawancara di Palu tanggal 6 Desember 2005.

<sup>26</sup> Militer yang mengkonsolidasi diri dengan memakai label Islam

dipihak sipil, fenomena itu dijadikan sebagai alasan agar militer turun dari panggung politik nasional. Informan bernama Arianto Sangaji mengatakan bahwa:

“ Konflik Poso tidak bisa dilihat secara sederhana, hal itu hanya bagian dari pertarungan kelompok elit lokal, mestinya hal itu dipakai juga sebagai bagian dari perebutan kekuasaan dalam skala nasional, karena awal konflik terjadi pada tahun 1998, dimana Indonesia masuk dalam masa transisi, Soeharto baru saja turun dari kursi kepresidenan, terjadi proses demokratisasi dan militer terancam kedudukannya dalam peta politik nasional”<sup>27</sup>

Argumentasi tersebut menggariskan, bagaimana militer secara dini terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, Secara langsung ia mengakomodir kebutuhan alat-alat kekerasan dengan jalan menyewakan atau menjualnya ke komunitas yang berkonflik, sementara secara tidak langsung, militer mengakomodir berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang bertikai secara nasional, terutama dari sipil yang mengkondisikan diri untuk masuk dalam pertarungan di aras lokal. pembentukan milisi atau paramiliter dapat dipahami dalam konteks demikian. Pembentukan pasukan paramiliter menurut Andi Wijayanto bahwa “mereka berasal dari perwira berpangkat Mayor Jenderal dari Angkatan darat dan dari Kepolisian, pernah menduduki jabatan penting seperti Panglima Daerah atau Kepala Kepolisian daerah, menjelang masa pensiun mereka berada dibelakang milisi”.<sup>28</sup>

Terlibatnya berbagai kepentingan dalam kekerasan di Poso, terutama dari aparat kekuasaan merupakan salah satu indikator mengapa wilayah konflik tersebut masih menuai ajang kekerasan, meski jumlah

pasukan dan besarnya anggaran telah dikeluarkan. Besarnya rincian anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Pada tahun 2001 jumlah dana untuk keperluan biaya operasi pemulihan keamanan sebesar Rp. 6.995.062.840,00, tahun 2002 jumlah yang dikeluarkan berkurang drastis hanya sebesar Rp. 624.800.000,00. Tahun 2003 dana tersebut meningkat lagi seiring dengan terjadinya penambahan jumlah pasukan keamanan sebesar Rp. 1.377.062.000,00. jumlah keseluruhan anggaran yang dikeluarkan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp. 8.996.924.840,00.(data Pemda Poso 2005) Melihat jumlahnya yang cukup besar, layaknya telah mampu menghapus kekerasan, namun sampai saat tahun 2006 jumlah pasukan dan anggaran yang besar demikian, belum mampu mencegah aksi-aksi kekerasan di Poso,.

Ketika pasukan keamanan bekerja tidak maksimal, maka mestinya pemerintah berupaya mengaktifkan masyarakat sipil dalam proses konsolidasi perdamaian, sebagaimana dalam konsep tradisional *sintuwu maroso*, mauun has itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya, jika hal itu terjadi maka yang intens melakukan adalah lembaga-lembaga non pemerintah dan warga Poso yang selama konflik, bergerak di program rekonsiliasi dan perdamaian. Pemerintah daerah dianggap sebagai institusi yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini, terkesan pasif Berbagai program yang ditawarkan terkesan a historis, bahkan beberapa pejabat dan pengusaha sibuk dengan urusan proyek bantuan pengungsi<sup>29</sup> pasca konflik komunal tersangkut korupsi, Eskalasi konflik yang meluas dalam

<sup>27</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

<sup>28</sup> Wawancara di Palu tanggal 6 Desember 2005

<sup>29</sup> Di Poso terdapat idiom-idiom yang berkembang dimasyarakat, salah satunya, kalau kita (pengungsi) dapat Super mie (mie Instan) maka dorang (para Pejabat) dapat super kijang (mobil)

hubungannya dengan isu korupsi di Poso menjadi sesuatu yang menarik untuk di kaji.

Poso telah masuk dalam tahapan-tahapan perdamaian, meski diantara dua komunitas yang pernah berkonflik masih menunjukkan sikap pasif dalam hal pergaulan antar komunitas yang berbeda, wilayah-wilayah hunian pegungsi juga homogen. Jika di Kota Poso dan wilayah Poso Pesisir penduduknya didominasi oleh masyarakat beragama Islam, maka di Kelurahan Tentena dan wilayah-wilayah pedalaman, para warganya lebih banyak beragama Kristen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, belum terdapat satu keberanian mengembalikan situasi sebagaimana sebelum terjadinya konflik komunal.

Tahapan-tahapan ke arah perdamaian, dalam hal interaksi antar kelompok yang berbeda dari segi agama saat ini telah nampak, warga yang berprofesi sebagai pedagang, terutama penjual sayur-sayuran dan sejenisnya, telah memulai aktifitas interaksi. Para pedagang sayuran tersebut beberapa beragama Kristen. Mama Mike, salah seorang pedagang sayur dari luar Kota Poso mengatakan bahwa :

“ kita sudah merasa aman berjualan di Pasar Sentral Poso ini, sekalipun masih-was-was, tapi kita kan harus mencari, apalagi pedagang disini yang Islam sudah saling kenal, jadi tidak apa-apa hanya saja kalau ada isu akan terjadi pembakaran atau pengeboman di Pasar sentral ini, kita cepat-cepat kumpul jualan kami unuk kembali ke desa atau tidak turun jualan, biasanya selebaran atau isu itu datang kalau ada pembunuhan atau Bom terhadap orang Kristen, seperti waktu Pasar Tentena di Bom atau ada siswa Kristen di bunuh, tapi kalau sekarang aman saja ”<sup>30</sup>

Paginya mereka masuk Kota, berjualan di kompleks Pasar Sentral, siangnya, pulang ke desa. Kekhawatiran pedagang walau masih ada, tapi tidak seperti sebelumnya, walau trauma masa lalu masih membayang. Mereka berjualan di Pasar Sentral Poso tidak ada gangguan lagi, siangnya pulang ke desa ketika ditanya mengapa tidak tinggal di Poso saja, Rika, Warga Poso Pesisir menjawab

“kami di desa punya rumah juga ada berkebun sayur, ada ubi juga dan hasilnya kami jual di Pasar Sentral, kami juga di desa membuat gula merah semuanya dijual di Pasar ini, kalau so siang kami pulang ke desa ... kita sudah aman, banyak aparat yang mereka berjaga-jaga disini, supaya tidak ribut kalau ribut kita jadi susah jualan”<sup>31</sup>

Pencitraan sebagai kota konflik hampir hilang walau masih melekat, namun warga memulai aktifitasnya dengan berupaya menanggalkan segala atribut konflik, bagi dua warga desa di atas, telah memungkinkan mereka melakukan aktifitas perdagangan sebagaimana sebelum konflik. Satu indikator penataan budaya kerja oleh masyarakat asli. Yang biasanya dipersonifikasi sebagai masyarakat yang renda etos kerjanya, Orang desa biasanya dilambangkan sebagai individu yang statis, homogen dalam pergaulan sebagaimana klaim kaum fungsionisme struktural tidak sepenuhnya benar Muhammad Talib Remi mengatakan bahwa :

“ Dalam bayang-bayang konflik masa lalu dengan semangat kerja yang telah kembali seperti sebelum konflik, mereka kembali melakukan aktifitas mencari nafkah, ... mereka tidak mungkin bermukim di kota sebab rumahnya di desa, besok mereka datang untuk berjualan lagi. Poso sesungguhnya menuju tahap-tahap aman masyarakat juga sudah berinteraksi dengan masyarakat lain meski beda agama Kota Poso di huni oleh warga yang mayoritas

<sup>30</sup> Wawancara di Poso tanggal 6 maret 2006

<sup>31</sup> Wawancara di Poso tanggal 12 maret 2006

beragama Islam, namun warga yang beragama Kristen telah ada, terutama mereka yang bekerja di pemerintahan<sup>32</sup>

Perdamaian Poso masih dibayangi oleh berbagai kekerasan. Beberapa kasus penembakan, pembunuhan, mutilasi, teror bom dan berbagai tindak kekerasan lainnya menjadi potensi bagi lahimya kembali kekerasan horisontal di Poso. Mekanisme pertahanan diri masyarakat Poso telah cukup kuat, sebab mereka mengalami sendiri betapa konflik telah menyusahkan diri mereka, berbagai teror yang terjadi nampaknya akan menjadi ujian bagi masyarakat Poso.

### **Konflik, Bisnis dan Meliterisme**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang bisnis militer dan pengembangan institusi teritorialnya dalam konteks Poso ada baiknya beberapa hal mendasar layak dipahami, sebagai upaya menganalisis lebih jauh tentang eksistensi hadirnya militer di dalam ranah konflik Poso. Kemudian mengaitkannya dengan eskalasi konflik yang bertahan, penambahan pasukan keamanan dan terdapatnya struktur teritorial yang baru dalam hubungannya dengan relasi bisnis yang dikelola oleh militer di daerah konflik Poso. Pengungkapan realitas tersebut penting mengingat berbagai fenomena yang muncul saat kehadiran aparat keamanan di Poso. Dibawah ini dicoba untuk menelusuri jawaban terhadap fenomena tersebut dengan terlebih dahulu menganalisis sejarah kehadiran militer sebagai pelaku ekonomi dan politik.

Hadirnya militer dalam area bisnis, disamping kemampuan keuangan negara yang jauh dari cukup untuk membiayai operasi militer dan kepolisian, juga merupakan kondisi historis dari bangsa Indonesia. Sehingga tampilnya mereka dalam pola kekuasaan yang di emban, memungkinkan aktor militer memainkan peran dalam hal bisnis, disamping

itu, juga sebagai upaya memperkuat posisi ekonomi politiknya. Hal ini, berkaitan dengan terbuka luasnya jaringan, mapan dan memiliki legitimasi atas eksistensi kehadiran mereka dalam percaturan politik dan ekonomi. Harold Crouch (1999 : 320).mengatakan :

“Sebaiknya dianut pandangan bahwa adalah biasa bagi para pejabat untuk menggunakan kedudukan resminya mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Sebagaimana terjadi di negara-negara tradisional warisan Jawa, tempat para pejabat memperoleh pendanaan lebih banyak dari berbagai keuntungan dibandingkan dengan gaji, demikian pula dengan para perwira Angkatan Darat, diharapkan dapat memanfaatkan kedudukan mereka sebaik-baiknya dalam birokrasi dan badan-badan pemerintah yang lain dan ini sering dipandang sebagai balas jasa bagi kesetiaan yang telah diperlihatkan sebelumnya, asalkan mereka dengan baik menjalankan tugas, tidak akan ada keberatan bila mereka memperkaya diri disamping melakukan tugas itu”.

Institusi TNI sangat berkepentingan terhadap perkembangan ekonomi dan politik Indonesia, ketika berbagai sumber daya yang resmi, seperti anggaran belanja bagi mereka sangat tidak memadai, untuk memenuhi kebutuhan institusinya. Salah satu wilayah potensial bagi perkembangan bisnis militer terdapat di Komando Teritorial (Koter). Institusi ini disusun tidak berdasarkan asumsi wilayah pertahanan. Berdasarkan asumsi pembagian wilayah birokrasi pemerintahan, Daerah. Komando Teritorial dimulai dari tingkat desa yang disebut Babinsa, kecamatan atau Koramil, kabupaten yang disebut Kodim, hingga Propinsi yaitu Korem dan regional setingkat Kodam, dan terakhir Nasional, Markas Besar Terlibatnya TNI dalam bisnis, awalnya guna menjamin munculnya pertumbuhan ekonomi yang sehat, institusi ini

<sup>32</sup> Wawancara di Poso tanggal 2 Desember 2005

kemudian menempati posisi-posisi strategis, terutama dimasa Orde Lama dan Orde Baru.

Ketika masyarakat di luar golongan priyayi mulai tertarik dan melirik gelanggang politik, kelompok militer justru cenderung melakukan intervensi politik dan bisnis. Mereka saat itu tidak menyukai, jika masyarakat sipil berpartisipasi dalam bidang tersebut, partisipasi ditekan sedemikian rupa agar tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Militer kemudian menguasai posisi-posisi strategis, basis ekonomi politik kemudian disiapkan diberbagai daerah, guna menunjang kebangkitan politiknya yang membutuhkan biaya besar. Kuatnya tatanan struktur yang telah berlangsung selama puluhan tahun, berdampak pada semakin sulitnya institusi ini melepaskan perannya diluar tugas sebenarnya, sebagai institusi yang memiliki legitimasi dari masyarakat dalam hal pertahanan dan keamanan.

Bisnis dan politik telah menjadi warisan historis Orde Lama dan Orde Baru. Namun benarkah tujuan militer berbisnis demi peningkatan kesejahteraan prajurit?. pertanyaan demikian selalu dijadikan sebagai argumentasi untuk melegitimasi kehadirannya dalam ajang bisnis. Endrirtono Sutarto<sup>33</sup> mengatakan bahwa :

“Bisnis militer dilakukan sebagai akibat dari kesejahteraan prajurit yang belum terpenuhi. Kalau hal itu bisa terpenuhi, TNI tidak akan melakukan bisnis dan pemenuhan kesejahteraan prajurit adalah kewajiban pemerintah, bukan TNI. Karena belum tercapai, maka saya terpaksa membantu untuk kesejahteraan prajurit “ (Kompas Ciber Media 21 Agustus 2002).

Beberapa kasus yang sempat mencuat kepermukaan, menemukan bahwa, terlibatnya

militer dalam bisnis, tidak lagi sebatas pada pemenuhan kesejahteraan prajurit, mereka telah jauh melampaui hal itu. Kasus-kasus penyelewengan dana Yayasan Darma Putra milik Komando Pasukan Strategi Angkatan Darat menunjukkan bahwa, betapa yayasan militer telah bertindak sebagai kasir atau penyandang dana. Tanpa pertanggung jawaban, seorang komandan bisa menarik dana dari perusahaan yang dimiliki oleh yayasan militer. Struktur yayasan yang mengikuti alur dan logika garis komando memungkinkan hal itu terjadi.

Bisnis yang dikelola oleh militer menurut para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI)<sup>34</sup> pada dasarnya di bagi dalam dua kategori utama, yaitu bisnis institusional atau formal dan non institusional atau informal. Danang Wijoyoko (2002) menyebutnya dengan *Criminal economi*. sementara Aditjondro (2004) mengkategorikannya sebagai bisnis kelabu militer. Wijoyoko melakukan pengamatan pada wilayah pasar gelap, dan lebih melihat terdapat kaitan antara militer dengan terjadinya bisnis yang berhubungan dengan cara-cara kriminal. Dalam konteks Aditjondro, fokus pengamatannya pada daerah konflik.

Terminologi bisnis kelabu sesungguhnya menunjukkan satu pemahaman bahwa aral bisnis tersebut masuk dalam kategori yang tidak jelas, institusional tapi tidak diatur dalam hukum yang ada, non institusional namun sebagian prakteknya melibatkan perusahaan yang dikelola oleh institusi tersebut. Sesungguhnya pemahaman wilayah bisnis militer dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, yaitu, institusional atau bisnis yang dilakukan secara resmi dan non institusional atau bisnis yang dikelola secara tidak resmi.

<sup>33</sup> Panglima TNI dimasa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

<sup>34</sup> Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1998.

Penelitian ini, meski juga menyoroti bisnis institusional, namun hanya sebatas pengantar kearah pemahaman bisnis non institusional. Yang disebut terakhir, peneliti lebih fokus dan mengaitkannya dengan berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi. Sehingga diharapkan akan ditemukan satu korelasi pemahaman antara bisnis militer dengan eskalasi konflik yang bertahan.

Konflik komunal yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, layaknya tidak hanya dipandang sebagai kekerasan antar masyarakat di dua komunitas yang bertikai, seperti di Poso, layak dipandang sebagai kekerasan komunal, dimana salah satu penyebabnya adalah, maraknya gugatan terhadap eksistensi militer dalam lakon mereka di bisnis dan politik. dimana pasca kekuasaan Soeharto dipaksa turun meninggalkan gelanggang politik, Arianto Sangaji, mengatakan bahwa, "konflik yang terjadi di Poso memiliki akar penyebab yang kompleks, dana korupsi Kredit Usaha Tani (KUT), Pemilihan Kepala daerah, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan eksistensi militer yang semakin digugat"<sup>35</sup> semua unsur-unsur yang disebutkan Sangaji di atas berinteraksi satu dengan lainnya, dimana kemudian dipahami sebagai penyebab konflik Poso.

Asumsinya bahwa, konflik dengan melibatkan militer lebih terkait dengan upaya institusi tersebut mempertahankan legitimasi ekonomi politiknya agar tetap eksis di masyarakat Sementara itu Andi Wijayanto memahami bahwa keterlibatan mereka, lebih berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan posisi dan perannya dalam mekanisme politik yang berkembang, Informan ini selanjutnya mengatakan bahwa "sejak awal militer telah memainkan peran dalam penciptaan konflik komunal Mereka sejak awal terlibat dalam

kerangka penggalangan, dan penciptaan kondisi"<sup>36</sup>.

Andi Wijayanto lebih terfokus pada cara dan operasi intelijen sebagai peneguhan kehadiran tentara, sementara Arianto lebih memahami kehadiran aparat keamanan secara keseluruhan, namun keduanya menyimpulkan bahwa telah terjadi hubungan sangat erat antara bisnis militer di wilayah konflik, politik dan eksistensi mereka dipentas politik nasional.

Salah satu realitas yang kemudian berkembang bersamaan dengan perkembangan konflik horisontal, adalah munculnya bisnis yang dikelola oleh militer secara kelabu. Masalah bisnis militer ini Institusi tersebut tertera pada UU No. 34 Tahun 2005 tentang TNI. Salah satu pasalnya pada pasal 3 menyebutkan bahwa, 1. Perusahaan-perusahaan militer baik yang berada langsung dibawah TNI dan perusahaan-perusahaan TNI dalam berbagai yayasan, Penyertaan saham yang dimiliki TNI diberbagai perusahaan swasta; usaha-usaha koperasi baik yang berada di mabas maupun kodam dan seterusnya, 4. Komersialisasi aset militer dan jasa pengamanan.

Militer dalam mengelola bisnisnya terdapat model bisnis lain diluar cara institusional, yaitu model non institusional, kelabu atau *criminal economic*. Pengelolaan bisnis yang dilakukan dengan cara formal seringkali memiliki kaitan erat dengan bisnis non formal, seperti ketika konflik terjadi. Wilayah hutan dan perkebunan masyarakat rawan terhadap tindak kekerasan, masyarakatpun enggan masuk atau keluar daerah mereka yang merupakan daerah homogen, akhirnya hasil kebun berupa coklat, cengkeh, kemiri, jambu mente, kelapa dan berbagai hasil bumi lainnya tidak mendapatkan pasar sebagaimana layaknya.

<sup>35</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

<sup>36</sup> Wawancara di Palu tanggal 6 Desember 2005

Kondisi demikian memberi kesempatan kepada tentara masuk melakukan transaksi bagi hasil kebun masyarakat, dengan harga jauh dibawah harga sebenarnya. Berbagai hasil hutan dan kebun tadi dijual ditempat-tempat tertentu, barang-barang itu kemudian ditampung oleh perusahaan-perusahaan milik militer dan pelaku bisnis lain yang memiliki jaringan kearah itu.

Keterlibatan militer dalam ajang bisnis di Sulawesi Tengah, terutama di Poso, telah dimulai jauh sebelum terjadinya konflik komunal di wilayah tersebut. Tercatat sekitar tahun 1950-an institusi ini telah melakukan upaya-upaya tersebut sebagai bentuk manifestasi kehadiran mereka dalam berbagai situasi, seperti politik, keamanan dan sosial, yang dikenal dengan istilah Dwi Fungsi ABRI. Dalam konteks keamanan, militer seringkali memainkan peran sebagai lembaga yang selalu mencitrakan diri sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban.

Eksistensi aparat keamanan dianggap *legitimate*, dan bersinggungan dengan berbagai persoalan ancaman, serangan, kerusuhan dan berbagai bentuk kekerasan lain. Persoalan substansial dalam hal ini adalah ketika "infiltrasi" yang dilakukan militer dan polisi atas nama keamanan, dimana aktifitas susulan kemudian terjadi. Dalam skala makro, kehadiran mereka di wilayah-wilayah konflik, merupakan melegitimasi kehadiran mereka dalam peta politik nasional, fenomena dari setiap bentuk gugatan terhadap eksistensi politik. Bersamaan dengan itu, berbagai ledakan kekerasan muncul di beberapa wilayah. Daerah itu kemudian terpelihara sebagai zona-zona konflik dimana warna kekerasan selalu muncul kepermukaan. Bisnis insitusional ini bukan merupakan fokus bahasan, peneliti lebih menfokuskan pada bisnis non insitusional aparat keamanan di Poso karena berkaitan dengan penguasaan sumber daya sosial (ekonomi politik) di wilayah konflik.

Militer masuk sebagai pemberi jaminan bagi terciptanya keamanan di wilayah konflik, bersamaan dengan itu, institusi ini eksis melakukan penataan dan konsolidasi sebagai upaya transformasi terhadap segala bentuk realitas politik dan ekonomi yang ada. Keterlibatan militer terhadap zona-zona konflik dan kekerasan, tidak dengan sendirinya masyarakat yang berada dalam zona konflik menjadi aman dalam arti sesungguhnya. Kekerasan masih muncul dan kerap kali terjadi, di Poso, tindak kekerasan dengan berbagai bentuk dan macamnya masih sering terjadi.

Lembaga Pengkajian Studi Hak Asasi Manusia (LPS HAM) Palu mencatat, sekitar dari 93 kasus kekerasan, baik berbentuk penyiksaan maupun perlakuan kejam lainnya terjadi antara 1 Januari 2002 sampai dengan 23 Juni 2004<sup>37</sup> Saat itu aparat keamanan telah bertugas mengamankan wilayah konflik Poso. Banyak kasus yang terjadi di Poso, sementara aparat keamanan terkonsolidasi penuh di wilayah tersebut dalam rangka mewujudkan eksistensi Negara sebagai pemberi perlindungan kepada masyarakat.

Catatan di bawah ini menunjukkan pasang surutnya jumlah penempatan militer dan polisi di Poso. Tahun 2003 tercatat sekitar 4.764 dengan rincian TNI 1.668 dan polisi 3.096 jumlah terbesar dibanding dengan penempatan aparat dari tahun 2002 sampai dengan 2004 Sementara jumlah korban penyiksaan dan tindakan kekerasan lainnya saat itu masih sangat banyak, sekitar 13 kasus yang sempat tercatat. Sebelum militer dan polisi bertugas di Poso, pemakaian senjata senjata tradisional lebih dominan, saat aparat keamanan bertugas, senjata organik menjadi dominan dipergunakan. Hal demikian menunjukkan bahwa, unit analisisnya tidak

---

<sup>37</sup> Data demikian peneliti dapatkan dari beberapa dokumen lembaga tersebut dan wawancara peneliti dengan beberapa aktivisnya.

hanya antar kelompok masyarakat yang bertikai, yaitu komunitas Muslim dan Kristen. Kajian layaknya lebih dikembangkan pada kekuatan-kekuatan besar yang berada dibelakang eskalasi konflik. Arianto Sangaji mengatakan bahwa "militer terlibat secara langsung, dan tidak langsung dalam konflik di Poso. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa, institusi ini melibatkan diri dalam konflik dengan cara membagi-bagikan amunisi kepada mereka yang berkonflik, atau tindakan-tindakan lainnya. Secara tidak langsung, biasa saja mereka mengorder orang lain untuk melakukan kekerasan"<sup>38</sup>

Aparat keamanan telah dikerahkan secara maksimal, di Poso militer dan polisi yang bertugas demikian besar jumlahnya, setiap kebijakan penambahan pasukan. otomatis aparat keamanan memperoleh keuntungan institusional maupun pribadi. Atas nama kekerasan di Poso, mereka kemudian memperkuat institusinya dengan jalan membangun satuan-satuan operasi militer bersenjata organik di wilayah konflik tersebut. Hal ini terlihat setelah kerusuhan, militer mendirikan kesatuan inventori 714 *sintuvu maroso* terdapat sekitar 14 kompi ditempatkan di posisi tersebut, dan dibagi dalam dua tempat, di Pendolo dan Morowali.

Sementara dari pihak kepolisian juga melakukan hal yang sama, terdapat dua kompi pasukan brimob yang ada di Poso. kompi pertama bermarkas di Moengko sementara kompi kedua berpusat di Morowali, dua wilayah yang merupakan basis militer dan Polisi di Poso. Sebelum konflik terjadi, belum terdapat markas yang dimaksud. Artinya, pasca penempatan aparat keamanan militer dan Polisi tidak hanya menambah pasukan organik, namun juga telah memperluas basis-basis institusinya.

Fenomena lain yang sering terdengar, bahwa untuk kepentingan teritorial, militer

berencana untuk memperluas jaringan institusinya dengan membentuk Komando Distrik (Kodim) bertempat di Morowali atau Tojo Una-Una. Jastifikasi terhadap terjadinya tindak kekerasan dan merebaknya konflik horisontal di Poso menginspirasi militer memperluas institusinya sampai di wilayah basis-basis konflik. Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat (TNI AD) saat ini memiliki rencana mendirikan sekitar 17 Komando Daerah (Kodam) diluar Kodam yang telah berdiri. Rencana pendirian 17 Kodam baru tersebut sebagai justifikasi terhadap merebaknya kekerasan yang terjadi. Dapat saja terjadi pemekaran Kodam, dan di Sulawesi utara akan berdiri Kodam baru jika konflik dan kekerasan terus terjadi, secara institusional militer sangat diuntungkan akibat terjadinya kekerasan di Poso".

Rencana pendirian kembali Kodan XIII yang berpusat di Manado masih belum terlaksana, namun tahun 2002, Danrem 132/Tadulako memberi penegasan bahwa TNI AD akan segera membentuk satu Batalyon baru Yon 714 Sintuwu Maroso yang berkedudukan di Poso Menurut Danrem, Batalyon baru dengan ketiga kompi nya akan bertugas menangani masalah keamanan sepanjang pesisir pantai timur Sulawesi Tengah.

Guna mewujudkan batalyon baru itu telah dipersiapkan lokasinya di Raronuncu, Poso. 747 personil TNI AD akan bertugas menjaga keamanan Poso secara permanen. Selain itu juga akan dibangun markas Kompi C di di Pendolo<sup>39</sup> Kedudukan Kompi akan menggantikan tugas Kompi B Batalyon 711/Raksatama yang kini berkedudukan di Kawua (Poso Kota) Menurut Aditjindro (2004 : 23). "Lokasi markas Kompi C di Pendolo, telah dibebaskan lahan seluas sembilan hektar yang tadinya milik 21 orang warga Pendolo

<sup>38</sup> Wawancara di Palu tanggal 10 Desember 2005

<sup>39</sup> Ibu kota Kecamatan Pamona Selatan, salah satu wilayah Poso



Biaya Ganti rugi sebesar Rp. 206 juta disediakan oleh pemerintah kabupaten Poso.

Berbagai rencana pembangunan institusi militer tersebut yang lebih diprioritaskan pembangunannya adalah markas Kompi C yang berada di Morowali<sup>40</sup> hal ini dapat dianggap sebagai indikator akan pentingnya rencana investasi perusahaan yang masuk dalam jaringan para petinggi militer, Artha Graha berencana menanam modal sebesar AS\$ 3 juta di usaha tambang marmer seluas 150 hektar di Morowali. Juga akan mengembangkan berbagai usaha lain di Morowali, seperti pertanian, peternakan, perkebunan serta pengumpulan hasil hutan. dalam hal ini “ Artha Graha berencana membangun 270 km jalan dari Kolonodale sampai ke Kendari, ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara. Ruas sepanjang 120 km dari jalan poros itu akan dijadikan jalan tol. Semua rencana itu akan membengkakan investasi kelompok Artha Graha di pantai timur Sulawesi sampai Rp. 300 milyar (George Junus Aditjondro 2004 : 24) .

Morowali dan Poso, dua wilayah yang pernah bergabung menjadi satu kabupaten, (Poso) memang memiliki kedekatan geografis dan budaya, terutama geografis, banyak perusahaan-perusahaan nasional yang menanamkan modalnya di daerah tersebut, termasuk kelompok usaha yang dikelola oleh kongsi pejabat militer dan pengusaha sipil. Karena itu jika konflik terjadi di wilayah Poso sangat berkorelasi dengan alur-alur bisnis yang merebak di wilayah tersebut.

Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi, seperti penembakan, teror bom maupun pembunuhan dapat saja dianggap sebagai indikator bahwa situasi keamanan di wilayah konflik masih belum menentu.. Kekuatan pasukan organik dan institusi yang kuat, memungkinkan munculnya berbagai

aktifitas diluar konteks profesi yang diemban, yakni pertahanan dan keamanan. Aktifitas sangat menonjol adalah munculnya bisnis institusional dan non institusional ataupun bisnis kelabu ataupun kriminal ekonomi yang dikelola dan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung militer dan polisi di Poso.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terlibatnya militer dalam bisnis, telah dimulai sekitar tahun 1950-an, selain bentuk kegiatan bisnis yang bercorak institusional maupun non institusional mereka juga melakukan kegiatanm bisnis yang bercorak kelabu seperti penyeludupan, penebangan liar (*illegal logging*) dan sebagainya. Sejak konflik komunal terjadi di Poso, bisnis pungutan liar telah muncul seperti yang terjadi di pos-pos pungutan yang dilalui oleh kendaraan berbagai jenis, memasuki wilayah Poso, sekitar desa Tumoura dan beberapa desa arah Poso Kota. Bisnis institusional adalah kategori untuk bisnis yang melibatkan militer secara kelembagaan, sebagai contoh adalah pengelolaan yayasan. Koperasi, biasanya mengikuti struktur komando. Ditingkat Maskas Besar (Mabes) menggunakan nama induk, ditingkat Komando Daerah memakai nama pusat, sementara di tingkat Komando Resort dan Komando Distrik menggunakan nama Primer.

Bisnis informal adalah bisnis militer yang tidak melibatkan militer sebagai lembaga, melainkan individu-individu pensiunan militer atau anggota yang tidak lagi aktif, namun mereka telah merintisnya sejak masih aktif dalam dinas. Kelompok usaha Nugra Santana di bawah komando Ibnu Sutowo berpangkat terakhir Letnan Jenderal dan kelompok usaha Krama Yudha dibawah komando Sjamoebi Said yang pensiun sebagai Brigadir Jenderal dapat dijadikan contoh bisnis kategori ini. Yang lebih mikro lagi adalah PT Gunung Latimojong, PT Kartika Rona Usaha Perkasa, anggota kelompok perusahaan Jayanti Group.

<sup>40</sup> Sebelum berdiri sendiri, wilayah ini masuk dalam Kabupaten Poso.

bisnis non institusional demikian adalah satu bentuk usaha yang dikelola oleh purnawirawan ABRI (TNI sekarang) dan keluarga, mereka sudah berkembang menjadi pelaku bisnis yang kuat dan berpengaruh.

Hubungan bisnis institusional dan non institusional dapat dilihat dari model perekrutan para pelaku bisnis. Para pelaku ekonomi swasta biasanya merekrut para perwira tinggi untuk duduk sebagai komisaris di perusahaan mereka. Kasus lain, para perwira tinggi banyak yang dikaryakan untuk menduduki jabatan penting di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diposisi mereka dalam memimpin perusahaan negara tersebut tidak jarang terjadi skandal dan penyelewengan jabatan. Pada akhirnya dipenghujung jabatan di BUMN tersebut, mereka telah berhasil mengumpulkan sejumlah modal dan relasi untuk kemudian membangun jaringan usaha sendiri.

Kategori bisnis ketiga yaitu *criminal economic* atau bisnis kelabu, lebih bersentuhan pada upaya perlindungan yang diberikan oleh anggota militer terhadap praktek bisnis gelap yang melanggar hukum, misalnya, penyedia jasa tenaga demonstran, beking perjudian, penyediaan uang keamanan, seperti yang terjadi di Maluku, untuk mengantar warga ke bandara, mereka biasanya meminta kawalan aparat keamanan sebab akan melewati zona daerah rawan, aparat keamanan dibayar antara Rp. 350.000,00 – Rp. 600.000,00 jika melewati laut, kalau perjalanan menempuh darat bisa mencapai dua kali lipat, ongkos tersebut sudah termasuk biaya transportasi. Saat situasi konflik belum terjadi, warga hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,00.”

Bisnis kelabu lainnya yang terdapat di daerah konflik menyangkut beberapa hal, namun yang paling menonjol terlihat adalah bentuk seperti, memfungsikan diri sebagai petugas keamanan di beberapa perusahaan, penangkapan dan penyeludupan flora dan

fauna, yang merupakan barang langka, mereka biasanya meminta kepada penduduk dimana aparat keamanan tersebut bertugas, dari beberapa keterangan yang diperoleh dari informan, tanduk rusa, ayam kampung dimasa konflik masih berkecamuk sering dijadikan sebagai alat barter bagi masyarakat yang membutuhkan peluru.

Banyak jenis dan praktek bisnis bersifat kelabu yang terjadi di Poso, perkembangan bisnis ini seiring dengan situasi konflik yang terjadi. Artinya, daerah Poso yang menjadi ajang kekerasan merupakan potensi besar, tidak hanya bagi para prajurit yang bertugas di lapangan, tapi juga mereka yang memainkan alur politik di tingkat yang lebih tinggi seperti promosi karir ke posisi lebih tinggi dan dana operasional yang berkurang setiap semester, yang diterima oleh para prajurit yang bertugas, beberapa aksi yang dilakukan oleh aparat keamanan berlang-sung. Aksi sejumlah anggota Brimob yang mempertanyakan pemotongan uang tersebut menjadi salah satu contoh.. Kemudian tahun 2002 ada personil yang melapor ke Solidaritas Anti Korupsi Sulawesi Tengah (SAKSI) perihal pemotongan dana kesejahteraan prajurit di lapangan. dan masih banyak praktek bisnis yang masuk dalam kategori kelabu di Poso.

Bisnis khusus dan merupakan ciri khas sumber daya alam Sulawesi Tengah adalah kayu hitam jenis ebony. Ebony merupakan jenis kayu berkualitas tinggi dan terbaik di dunia, jenis ini hanya terdapat di Sulawesi Tengah. Bisnis ini dikelola oleh militer jauh sebelum konflik horisontal terjadi. Guna menopang perkembangan kegiatan bisnis tersebut, maka di Sulawesi Tengah didirikan berbagai koperasi milik TNI dan Polri yang tersebar di empat kabupaten dan kota. Dari sekian koperasi tersebut, 4 koperasi terdapat di Palu, sementara di Poso sekitar 3 koperasi milik TNI dan 1 milik Polri. Di kabupaten Banggai 2 koperasi milik TNI dan 1 milik Polri. Di Kabupaten Toli-Toli 3 koperasi milik TNI

## **Surahman Cinu; Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)**

dan 1 milik Polri (Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah 2002) satu koperasi dikelola oleh para Purnawirawan TNI di Palu.

Bisnis kayu hitam yang dilakoni oleh militer, biasanya dikelola dengan cara non institusional, aktifitas ini telah berlangsung sejak tahun 1960-an, namun demikian, pola dan bentuk keterlibatan militer dalam bisnis demikian berbeda dengan gaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis lainnya. Sejak tahun 1970-an telah terdapat individu militer

yang menjadi pelaku bisnis utama, PT. Gunung Latimojong (Gulat) milik Sandewang. Seorang purnawirawan berpangkat Kolonel sebagai contoh. Perusahaan ini menurut beberapa informan yang intens<sup>41</sup> melakukan investitgasi berbagai kasus penebangan liar di Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa "PT.Gulat meninggalkan masalah serius di wilayah garapannya di daerah Pantai Barat Sulawesi Tengah karena tidak dilakukan lagi reboisasi setelah mereka melakukan penebangan secara besar-besaran"

Tabel 3 Nama-Nama Koperasi TNI dan Polri di Poso Tahun 2002

NO	Nama Koperasi:	Alamat:	Badan Hukum
1	Primkoppad DIM 1307	Kasintuwu / Poso Kota	308/BH/KWK. 19/IV/96
2	Primkoppad 711 Raksatama	Kawua / Poso Kota	178/BH/PAD/KWK.19/IV/96
3	Primkoppol Resort Poso	Gebang Rejo / Poso Kota	411/BH/PAD/KWk/.19/IX/96

Data : Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah

Bisnis dan perdagangan kayu ebony di Sulawesi Tengah, merupakan kawasan strategis, terutama di daerah Pantai Timur di wilayah Toli-Toli serta Pantai Barat Kabupaten Donggala, wilayah terakhir yang disebut tadi, sering menjadi lokasi penumpukan kayu ebony, dari kawasan itu ribuan kubik kayu hitam telah diseludupkan. Pembelian kayu hitam biasanya dilakukan secara langsung oleh pengusaha kepada masyarakat setempat, disuatu tempat yang diistilahkan dengan *take over* .atau tempat pengoperan tempat ini sangat luas untuk menampung berbagai kayu Eksistensinya menurut M. Najib Azca (2004 77) "diketahui oleh aparat desa". Karena bisnis ini dibekingi oleh oleh orang kuat aparatpun tidak berani menegur,

bahkan dalam beberapa hal mereka ikut aktif membantu.

Para pengusaha kayu dalam menjalankan kerja bisnisnya dibekali dengan Surat Angkut Kayu Olahan (SAKO) dari Perhutani, jangka waktu berlakunya selama satu tahun, surat izin tersebut juga dapat dipindah tangankan. Meski para pengusaha telah dibekali SAKO sebagai izin angkutan kayu, namun dalam perjalanan, mereka dimintai uang pungutan disetiap pos yang dilewati, jika tidak maka kayu akan disita kemudian diserahkan ke Polda dan diteruskan ke Departemen Kehutanan untuk dilelang. Terdapat modus operandi dalam hal pengangkutan kayu di Sulawesi Tengah, angkutan yang ditahan karena membawa kayu bermasalah, biasanya dibuat transaksi

<sup>41</sup> Edmun adalah salah satu diantaranya, wawancara dilakukan di Palu tanggal 12 Pebruari 2006

jika barang telah laku, maka hasil penjualan di bagi setengah untuk petugas dan setengah lagi diberikan kepada pemilik kayu.

Kendaraan angkutan yang digunakan cukup variatif dan difungsikan sesuai dengan kondisi lokasi lokasi dan penjagaan, mobil pribadi, mobil angkutan umum, mobil dinas, bahkan sampai mobil *ambulance* yang fungsinya untuk dalam keadaan *emergency*, misalnya membawa orang sakit, juga terpaksa dipakai untuk mengangkut kayu yang berstatus “sakit” agar upaya meloloskan angkutan berjalan dengan baik.

Modus operandi lainnya dilakukan dengan cara memakai mobil boks, awalnya kendaraan jenis ini berangkat ke wilayah Luwuk sambil membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti, rokok, gula, terigu, dan sebagainya. Saat pulang ke Palu, dalam perjalanan mereka mampir di beberapa lokasi atau tempat yang diduga menampung berbagai kayu, terutama kayu ulin (kayu besi) jenis kayu berkualitas tinggi.. Kayu-kayu tadi kemudian diangkut dalam mobil boks, kemudian dipasarkan. Perjalanan melewati darat dari Luwuk, melalui wilayah Poso, sementara daerah-daerah sepanjang Kabupaten Poso akan melewati beberapa pos pemeriksaan, yang diperiksa bukan hanya KTP, juga barang-barang yang berada dalam tas atau sejenisnya. Sebagai wilayah yang pernah dilanda kerusuhan (konflik) pemeriksaan dilakukan sangat ketat. beberapa informan mengatakan bahwa seringkali kayu-kayu tersebut lolos dengan modus operasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Edmund, ia mengatakan bahwa “disamping kendaraan, juga modus operandinya cukup variatif dan siapa yang berani mempersulit, disepanjang pos-pos penjagaan kan juga petugas”.<sup>42</sup>

Kabupaten Poso jauh sebelum terjadinya konflik, telah dikenal sebagai

penghasil kayu hitam. (*ebony*) Ketika aparat masuk memperkuat sektor-sektor keamanan di sana, bersamaan dengan itu, berlangsung pula praktek bisnis, dimana mereka berperan sebagai pelaku utama. Bahkan dimasa konflik, intensitasnya lebih sering dibanding pada masa sebelum kerusuhan. Mereka membawa truk langsung ke hutan kemudian dibawa ke bengkel pengolahan, saat konflik sedang berkecamuk salah satu bengkel kayu yang berada di jalan Pulau Irian (Poso Kota) menerima kayu dari mobil-mobil TNI. Sampai saat ini masih banyak kesatuan, meminta kepada beberapa orang yang dianggap memiliki kemampuan sebagai pencari kayu hitam, untuk menjalankan aktifitas pencari kayu hitam di hutan, mereka kemudian menjadi pemasok bagi kepentingan bisnis militer.

Di wilayah sebelah barat sungai Poso sampai Poso Pesisir, banyak anggota TNI terlibat dalam pengumpulan dan perdagangan kayu hitam selama konflik pertama sampai dengan ketiga. Situasi yang rusuh dimana masyarakat mengalami rasa takut akibat sebab berkecamukan kekerasan, justru untuk aparat keamanan menjadi situasi yang kondusif bagi perdagangan ilegal.

Praktek penebangan terhadap kayu hitam di wilayah kabupaten Poso, telah dilarang oleh pemerintah setempat. disamping pelarangan penebangan kayu lainnya, di beberapa tempat di wilayah tersebut. Maraknya penebangan liar (*illegal logging*) mengharuskan beberapa dinas dan pihak keamanan menggelar operasi pengamanan kayu-kayu hasil tebangan liar tersebut. Dinas kehutanan Kabupaten Poso pada bulan Maret 2003 berhasil menggagalkan usaha pengangkutan kayu olahan di Pendolo, wilayah Pamona Selatan, barang tersebut tidak disertai surat-surat resmi sebagaimana lazimnya izin angkutan. Kayu yang ditahan diperkirakan sekitar 70 meter kubik, jumlah yang sangat besar. Menurut Ir Nahardi, kayu

<sup>42</sup> Wawancara di Palu 12 Pebruari 2006

tersebut adalah milik oknum aparat TNI di Sulawesi Selatan (Aditjondro, 2004 : 153). Sebelum tahun 2003, tepatnya tahun 1999 kayu hitam milik konglomerat lokal Sulawesi Tengah, Willem Sakung berhasil ditangkap oleh pihak militer Angkatan Laut dalam jumlah yang besar. Penangkapan tersebut terjadi sebanyak dua kali. Namun, tidak diketahui secara jelas distribusi kayu tersebut, sangat sulit untuk dilacak. Edmund mengatakan bahwa :

“Investigasi tentang bisnis militer hubungannya dengan sumber daya alam seperti kayu hitam, menjadi sangat sulit dilakukan, sebab menyangkut jaringan yang begitu rapi dan tersembunyi, disamping itu juga bersinggungan dengan kekuatan besar yang berada dibelakang bisnis tersebut, hal itu sangat saya rasakan”.<sup>43</sup>

Praktek *illegal logging* di wilayah Pamona selatan sesungguhnya berlangsung lama, praktek Demikian muncul akibat terdapatnya berbagai kemudahan yang diperoleh, lokasi yang cukup jauh dari jangkauan aparat dan polisi pengawas hutan dan mudahnya mengakses ke Sulawesi Selatan.

Menurut masyarakat setempat, sebagaimana di kutip oleh Aditjondro di atas, bahwa seorang anggota 141 Makassar di pos penjagaan Pendolo, terlibat dalam perdagangan kayu dan damar, dia menggunakan kendaraan dinas militer, melintasi perbatasan menuju Sulawesi Selatan. Sekitar kawasan tersebut memang terhadap hutan yang lebat, tertanam berbagai macam jenis tanaman kayu berkualitas, yang memungkinkan eksploitasi kayu di daerah tersebut terus berlangsung sedemikian rupa.

Di wilayah Barat sungai Poso sampai ke Poso Pesisir, anggota-anggota TNI dari batalyon 721, 722, 723, 724, , 725 dan 726

Komando Pasukan Strategis dari Sulawesi Selatan, banyak terlibat dalam pengumpulan dan perdagangan kayu hitam selama awal kerusuhan. Sampai dengan kerusuhan jilid ketiga, mereka bersama anggota Kompi C Senapan Batalyon 711 Raksatama Poso, padahal sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 6/1974 bahwa perwira aktif yang masih berdinis dilarang berbisnis. Sebagai akibat dari kondisi historis, dan terdapatnya peluang-peluang usaha di wilayah konflik, apalagi bagi aparat yang tidak hanya memiliki naluri tempur namun juga naluri bisnis. Naluri tempur diarahkan kebisnis dengan cara ekspansif.

Sampai pertengahan tahun 2003, masih terdapat anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam jual beli bantalan kayu hitam, meski telah dilarang oleh Dinas Perhutanan kabupaten Poso, kecuali pengolahan limbah, namun salah seorang pengrajin kayu hitam di Rorononcu, pusat kerajinan kayu hitam di Poso mengatakan bahwa, tiga bantalan yang tergeletak itu adalah milik seorang anggota Brimob yang sedang bertugas di Poso. Hal tersebut berlangsung semenjak Poso mengalami kerusuhan sampai dengan saat “damai”. Pembuatan cenderamata dari kayu hitam yang biasanya diberikan kepada kolega di luar Sulawesi Tengah, ternyata tidak hanya dilakukan oleh anggota Brimob yang menitipkan tiga buah bantalan tersebut, banyak pejabat sipil dan aparat keamanan lainnya, juga melakukan hal serupa.

Bisnis kayu hitam di wilayah konflik Poso memang sangat menggiurkan, sebuah souvenir dengan bahan dasar kayu hitam bisa mencapai ratusan ribu rupiah harga berlaku di Poso, sementara jika telah sampai di luar Propinsi Sulawesi Tengah harga tersebut meningkat jauh, sebuah perahu berukuran 50 cm bisa mencapai lebih dari seratus ribu rupiah, sementara di luar telah meningkat beberapa kali lipat.

<sup>43</sup> Wawancara di Palu tanggal 12 Pebruari 2006.

Larangan penebangan kayu hitam di wilayah Poso telah lama diberlakukan, bahkan beberapa zona kawasan penebangan untuk semua tanaman tidak diberi izin tebang, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah resapan air seperti di Desa Saloupa. (Pamona Utara) Semua jenis pohon dilarang dieksploitasi, ternyata salah seorang pengusaha Souwmiel disana, melakukan penebangan di desa Tonusu dekat air terjun Saloupa, terjadi insiden pemukulan terhadap pengusaha yang melakukan penebangan tersebut, oleh petugas kehutanan yang ditemani polisi dari Kelapa Dua Bogor, sebagai akibat dari ucapan dia yang tidak mau berurusan dengan bawahan, namun sang pengusaha tidak menerima aksi pemukulan itu dan melapor ke "atasannya". Kepala Desa Tonusu mendapat teguran keras atas insiden itu, padahal ia juga seorang petugas kehutanan.

Menurut George Junus Aditjondro, sebagai akibat dari terjadinya aktifitas penebangan liar di kawasan hutan di wilayah tangkapan air, danau Poso memiliki kontribusi terhadap pengurangan efektifitas penyimpanan air buat danau itu (Aditjondro, et.al 2004 : 155). Kawasan tersebut telah dilakukan upaya penanaman beberapa jenis tanaman keras, seperti cengkeh dan coklat oleh penduduk yang mendiami wilayah itu, namun akibat aktifitas ekonomi tersebut, masyarakat memiliki akses langsung terhadap kondisi danau. Tahun 2003 sebagaimana menurut Aditjondro permukaan air danau itu naik sekali menggenangi perkampungan disekitar danau dan hampir masuk ke hotel Pamona Indah di tepi Danau, saat itu musim hujan belum menghampiri desa tersebut.

Bisnis lain dalam kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam oleh beberapa pelaku bisnis dan terjadi pada saat konflik, adalah cengkeh, hasil tanaman yang biasanya dijadikan sebagai bahan baku rokok dan bumbu masak juga obat-obatan dan

parfum ini, memiliki nilai jual tinggi, baik dipasar domestik maupun pasar internasional. Tidak mengherankan jika komoditi ekspor ini menjadi rebutan, proses untuk memperoleh cengkeh, biasanya para pedagang menempatkan "kaki tangannya" di beberapa desa yang dianggap sebagai daerah penghasil cengkeh. mereka kemudian membeli bahan baku tersebut, kemudian diserahkan ke "pongawa". dengan harga murah, memakai sistem rente. Pemilik barang yang tidak terkait sistem tersebut, biasanya melepas dagangannya sesuai dengan harga pasar, bagi para petani cengkeh yang memiliki modal kuat, mereka biasanya langsung membawa dagangannya ke para agen pengumpul hasil bumi yang berada di pasar sentral atau tempat-tempat lain.

Kerusuhan yang terjadi di wilayah Poso, memungkinkan kebiasaan tersebut tidak lagi berlaku, ketidak inginan mengambil resiko hanya untuk pergi mengambil hasil kebun. pengungsi menjadi pilihan. Bagi petani yang berdiam di daerah Tentena, dimana komunitas Kristen tinggal dan mengungsi, petani masih sempat menikmati hasil kebunnya, mereka masih bisa memetik pohon, terutama cengkeh dan kakao (coklat) tapi akses yang terbatas, bahkan terputus ke wilayah lain sebagai dampak dari konflik memungkinkan mereka tidak lagi memiliki kesempatan ke pasar-pasar seperti biasanya.

Memahami realitas demikian, pilihan praktis ditempuh, yaitu memberikan hasil bumi mereka, tidak lagi pada kaki tangan yang selama ini beropersi atau mereka kenal, tetapi kepada para aparat yang sedang bertugas. Kondisi keamanan yang tidak menentu, kemudian tidak tersedianya bahan penunjang, seperti bahan bakar minyak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, membuat mereka sangat bergantung kepada pihak yang mampu mendatangkan barang-barang tersebut, yaitu, aparat keamanan.

## **Surahman Cinu; Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)**

Pihak keamanan mendatangkan barang kebutuhan sehari-hari dimaksud dengan biaya cukup tinggi. Tidak adanya pilihan lain, masyarakat akhirnya membeli barang kebutuhan tersebut, namun tidak jarang ditemukan barter terjadi diantara mereka, warga menyodorkan hasil kebunnya, aparat menukarnya dengan barang kebutuhan, walaupun masyarakat menjual hasil bumi, pilihannya ke aparat. Transaksi ditentukan dengan harga 17.000 rupiah untuk satu kg cengkeh, saat itu harga cengkeh dipasaran berkisar Rp. 40.000,00 perkg. Belum lagi hasil bumi lain yang juga dibeli dengan harga yang murah.

Distribusi penyaluran cengkeh dan hasil bumi lainnya yang dibeli di daerah Tentena, selanjutnya tidak diketahui secara pasti kemana kemudian barang itu dijual, namun beberapa informan mengatakan, pembelian cengkeh di Tentena dilakukan oleh Primkopad, sebuah perusahaan koperasi) milik militer Angkatan Darat. Hampir tak seorangpun di Tentena saat konflik berkecamuk menjual hasil buminya kepada pedagang lain, selain pada perusahaan milik TNI. Sebab hanya TNI dan Polri yang memiliki akses keberbagai wilayah konflik saat itu. Maka dapat dibayangkan "monopoli" pembelian cengkeh dan hasil bumi lainnya yang dilakukan oleh TNI Polri dari masyarakat, mampu mengumpulkan berton-ton hasil bumi, meski demikian tak seorangpun informan yang dapat memberi keterangan tentang jumlah yang berhasil dikumpulkan. Demikian pula dengan jumlah keuntungan yang diperoleh melalui monopoli bisnis tersebut.

Hal menarik dari beberapa peristiwa di Poso, adalah hampir semua daerah yang mengalami teror, baik pembunuhan (dengan cara biasa atau mutilasi), penembakan, bahkan pembantaian, sebagian besar adalah wilayah-wilayah yang berhasil dalam pertanian, sebut saja beberapa daerah, Daerah Tentena, lokasi pengeboman yang

menewaskan 22 orang warga sipil. Tentena adalah wilayah yang dikenal sebagai penghasil cengkeh di Sulawesi Tengah, kaum migran, yang menetap di sana atau yang tinggal di Poso banyak memiliki kebun luas di wilayah tersebut.

Meski tiga desa yang telah disebut di atas merupakan wilayah yang berhasil dalam hal pertanian, namun agak sulit mencari kerelasi antara peristiwa terjadinya pembantaian dengan berbagai teror yang terjadi diberbagai tempat, terutama di tiga desa tadi. Hal menarik untuk dianalisis bahwa, dibalik berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah konflik, dimana kemudian militer masuk mengukuhkan eksistensinya, tidak hanya dalam hal keamanan dan politik juga dalam aspek ekonominya, seperti bisnis di wilayah konflik yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini terlihat relasi bisnis menjadi terpelihara sebagai akibat munculnya realitas ketakutan dalam masyarakat.

Ketika ketakutan tetap terpelihara maka bisnis yang bersentuhan dengan persoalan keamanan terpelihara pula. Para pelaku bisnis selalu menaruh harapan kepada pemberi jaminan keamanan bagi kelangsungan usahanya. Para penjamin keamanan dalam sejarahnya, sarat dengan berbagai kepentingan, mereka juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang ulung. Ketangguhannya dalam berbisnis ditopang oleh kekuatan yang berada dibalik bisnis tersebut, jadi *an sich* bukan semata hanya bisnis, sebab tangan yang tersembunyi dibelakangnya terdapat kepalan yang tersembunyi.

Teori *markets of violence* dari antropolog Jerman Georg Elwert menjadi alat analisis yang dapat membantu menjelaskan adanya korelasi antara para penjamin keamanan dengan pemeliharaan ketakutan, dalam hal perkembangan bisnis di wilayah konflik. Ketakutan menurut Elwert harus terus dipelihara baik dengan mengawetkan konflik maupun dengan mengawetkan citra bahwa

sebuah daerah masih tetap sangat rentan konflik

Analisis dari hubungan peristiwa tersebut adalah, bahwa teror yang terjadi, terlihat sebagai sebuah peristiwa dimana anggota dari para penjamin keamanan terlibat atau minimal menjadi pendorong terjadinya peristiwa teror, sebagaimana yang terjadi di desa Sintuwulemba, dimana warga muslim yang berusaha mengungsi, namun dihalang-halangi oleh aparat keamanan yang bertugas agar tidak mengungsi. Menurut mereka situasi dalam kondisi aman, demikian menurut Camat dan Kapolsek Lage yang sebelumnya melarang mereka mencari tempat aman.

Pimpinan pasukan merah Fabianus Tibo yang sebelumnya melarang mereka pindah mencari tempat aman, akhirnya memberi izin, siangnya mereka akan mengungsi, namun paginya sekitar pukul 11.00 anak-anak dan perempuan muslim disandera oleh kelompok merah dan selanjutnya terjadi pembantaian terhadap laki-laki Muslim. (lebih lengkapnya lihat bahasan tentang Konflik Poso jilid ketiga).

Berbagai kaitan dari peristiwa di atas jika diamati lebih jauh, dapat ditarik hubungan kausalitasnya, bahwa terdapat korelasi antara kekerasan dan ketakutan yang terpelihara di wilayah konflik dengan perkembangan bisnis yang dijalankan oleh pihak-pihak pemberi jaminan keamanan di wilayah tersebut. Hubungan-hubungan lain yang dapat diamati adalah pernyataan dari aparat yang bertugas bahwa, situasi masih dalam kondisi tidak aman. Hal itu dilakukan agar respon masyarakat terhadap kehadiran mereka. Ekonomi politik menjadi kondusif, hal demikian terjadi di daerah Tentena saat mereka membeli hasil bumi, utamanya cengkeh dari warga setempat. Tentena menjadi wilayah yang selama ini mendapat teror.

Buyungkatedo, Tentena, Buyungboyo adalah wilayah yang selama ini terkena teror,

disisi lain daerah tersebut merupakan kawasan pertanian yang sukses. Masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam, seorang informan Edmunt mengatakan bahwa : “Desa-desa yang selama ini terkena teror bom maupun pembunuhan dengan cara mutilasi adalah kawasan yang sukses dalam pertanian”<sup>44</sup>. Menganalisis hubungan militer dan bisnis di wilayah konflik dibutuhkan penelitian mendalam dan fokus khusus kearah itu.

Akurasi data yang berhubungan dengan hal itu. Data-data yang dibutuhkan adalah, apakah hasil pertanian yang dihasilkan oleh desa yang dimaksud kemudian dijual kepada aparat, jika tidak apakah orang yang bekerja sebagai pedagang pengumpul memiliki jaringan dengan aparat, kemana hasil pertanian itu dijual, dan yang terpenting, pengakuan dari para saksi atau tersangka yang mengarah ke aparat.

Guna membantu analisis hubungan antara kepentingan militer dengan kekerasan di Poso, maka harus ada penjelasan mengenai kerusakan yang berkesinambungan tersebut, dengan berbagai kepentingan militer yang sistematis. Minimal ada empat asumsi penting bagaimana pihak militer mempertahankan konflik Poso dan wilayah lain di Indonesia Asumsi pertama, adanya gugatan dari masyarakat sipil terhadap dwi Fungsi ABRI (TNI sekarang) dimana kemudian terjadi transformasi konflik dari skala vertikal ke konflik horizontal. Sebagaimana kata Munir bahwa pemecuan konflik horizontal di Maluku dan di wilayah Indonesia lainnya sengaja dilakukan oleh militer untuk membelokkan perhatian jauh dari tuntutan para mahasiswa, untuk penghapusan Dwi Fungsi ABRI<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Wawancara di Palu tanggal 12 Februari 2006.

<sup>45</sup> Munir 2000 makalah yang disampaikan pada konferensi mengenai “Conflict and Violence in Indonesia”. Makalah berjudul *Indonesia, Violence and the integration Problem*



Asumsi kedua, mempertahankan dan menambah struktur territorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat dengan cara memberi pencitraan kondisi yang membutuhkan pengamanan maksimal bagi masyarakat, analisis ini diperkuat dengan berdirinya beberapa kompi militer dan polisi seperti di Morowali dan di kelurahan moengko, ditambah dengan rencana militer untuk menambah 17 kodam baru, yang pernah dipangkas oleh pimpinan militer Orde Baru, akibat kurangnya sumber daya untuk mengisi peluang tersebut.

Kodam Merdeka yang berkedudukan di Manado nampaknya menjadi perhatian utama untuk kembali kembali, mengingat konflik yang terjadi di Indonesia lebih banyak terjadi di bagian wilayah Indonesia Timur. Dasar pemikiran untuk mendirikan kembali komando-komando daerah militer adalah kebutuhan pasukan dengan jumlah banyak guna menghadapi keresahan di wilayah konflik penambahan territorial militer dan polisi merupakan hal signifikan, mengingat institusi ini menjadi bagian penting dari militer untuk menjalankan fungsi pertahanan keamanan, juga adalah fungsi politik mereka.

Ketiga, persilangan ekonomi politik melanggengkan kekerasan di Poso, otonomi daerah memposisikan wilayah itu dalam *bargaining*, terutama dengan pihak luar. Tentu saja memiliki pengaruh buat militer, terciptanya kekerasan minimal terjadi penundaan kearah itu sambil mereka memperkuat posisi.

Sekitar 75% pengeluaran militer diperoleh dari bisnis militer dengan cara lain, para komandan militer memiliki akses kepada sejumlah uang yang dapat digunakan guna membiayai manuver-manuver politik masa depan. (ICG 2000). Salah satu Contoh adalah kasus di Yayasan Dhrama Putra yang dibebankan oleh Pangkostrad waktu itu Agus Wirahadi-kusuma. Telah diuraikan sebelumnya.

Asumsi ke empat adalah . rencana pengadilan terhadap para jenderal militer Indonesia, berkorelasi dengan berbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia. Hal terakhir tidak dibahas disamping tidak masuk dalam alur penelitian, juga data-dta tentang hal itu tidak mendukung.

### **Kesimpulan**

Konflik horisontal yang terjadi di Poso akibat munculnya dinamika elit yang dilatar belakangi oleh perebutan penguasaan sumber daya sosial, dimana kemudian, massa dilibatkan dengan memakai identitas agama dan budaya sebagai perekat kelompok. Keterlibatan massa dalam konflik horisontal tersebut didasarkan pada keterikatan dan keterkaitan mereka pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakininya. Agama dan budaya dalam konteks demikian dipahami sebagai institusi yang direproduksi oleh sistem sosial yakni elit sosial.

Peran tokoh agama, elit sosial dan pemerintah masih efektif karena simbol kultur *sintuwu maroso*, dimaknakan sebagai simbol persaudaraan dan persatuan yang kuat, ketika terjadi eskalasi konflik, pemaknaan kultur *sintuwu maroso* berdialektika dengan kekerasan, dimana eskalasi konflik semakin luas membuat posisi dan peran tokoh agama, elit sosial dan pemerintah semakin tidak berdaya menghadapi konflik horisontal Poso. Tidak berdayanya lembaga-lembaga masyarakat, memberi peluang masing-masing komunitas agama merekatkan diri, dimana sikap primordial semakin terbangun, struktur perasaan *in group* semakin kuat yang memperkokoh basis *in group*. Dengan demikian, struktur sosial budaya masyarakat yang telah terbangun sejak lama menjadi runtuh, akibat konflik yang tertransformasi oleh kekuasaan yang terus menyatu dalam relasi sosial yang ditempuh melalui level disharmonis.

Masyarakat Poso membutuhkan lembaga yang memungkinkan mereka dapat saling memahami dan berinteraksi satu dengan lainnya, dimana para pemuka agama dan tokoh masyarakat diberdayakan sebagai upaya konsolidasi perdamaian, demikian pula dengan rencana pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Poso (TPF) sebaiknya melibatkan mereka yang selama ini menjadi korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, Taufik (ed). 1987. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* Jakarta, LP3ES
- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi Dipersimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* Yogyakarta : Tiara Wacana
- Adimihardja, Kusnaka 1992. *Kesepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh, Pengelolaan Lingkungan secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat Bandung*. Trasito
- Adriani, N en Kruit, A.C. 1912, *De Bare'sprekende Toradja's van Midden Celebes*. Batavia : Lannsdrukkerij.
- 1919,. *Van Poso nar Todjo*, Tanpa Penerbit.
- Amdt, H.W. (ed) 1983. *Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta.. LP3ES.
- Azca M, Najib (ed) 2004., *Ketika Moncong Senjata Ikut Bermiaga, Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso*, Jakarta Kontras.
- Brth, Fredrik. 1969. *kelompok Etnik dan batasannya*, Jakarta. UI Press
- Baso, Ahmad. 1999, *Civil Society Versus Masyarakat Madani Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia* Bandung; Pustaka Hidayah.
- Bellamy, Richard. 1990, *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*. Jakarta : LP3ES
- Berry,David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. 1975. *Introduction of Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Miles and Sons.
- Booth, Anne, 1988,. *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta LP3ES.
- Bottomore, Tom 1992 *Sosiologi Politik* Jakarta: Rineka Cipta
- Budiman, Arief. 1991. *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: Monas University.
- . 1997. *Teori Negara: Negara kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- , (ed) 2000. *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia* Yogyakarta: Bigraf Publishiung
- Bulkin, Farhan. 1985. *Kekuatan – Kekuatan Politik di Indonesia* Jakarta: LP3ES
- Campbell, Tom. 1999. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta. Kanisius
- Chandra, Robby. I. 1992. *Konflik dalam Hidup Sehari-Hari*. Yogyakarta. Kanisius
- Christie, Kenneth, 1998. *Ethnic Conflict Tribal Politics. A Global Perspective* Surrey Curzon Press
- Clammer, john. 2003. *Neo-Marxisme Antropologi. Studi Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Yogyakarta. Sudasiva
- Coser, Lewis, A, 1956, *The Function of Social Conflict*, New York The Free Press
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan politik di Indonesia* Jakarta. Sinar Harapan

**Surahman Cinu;** Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)

- Darby, Jhon. 1986. *Intimidation and Control of the Conflict in Northern Ireland*. Dublin, Gill and Macmillan and Syracuse. Syracuse University Press
- de, Silva, Kinsley. M. 1986. *Managing Ethnic Tensions in Multi-Ethnic Societies*. Lanham University Press of America.
- Dedring, Juergen. 1973. *Recent Advances in Peace and Conflict : Research A Critical Survey* Beverly Hills saga
- Deutsch, Morton. 1973. *The Revolution of Conflict : Constructive and Destructive Processes* New Haven Yale University Press
- Diamond, Larry, 1990 *Revolusi Demokrasi Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Sedang Berkembang* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dukes, Franklin, 1996, *Resolving Public Conflict Transforming Community and Governance* Manchester University Press
- Duverger, Maurice 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta. Rajawali Press
- Effendy, Bahtiar, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Esman, Milton J. and Rabinovic Itamar. 1988. *Ethnicity Pluralism and the State in the Middle East*. Ithaca Cornell University Press
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar, Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah, Asih, Asuh.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1999, *membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*. Bandung Rosda Karya.
- Faturrochman (ed) 2004. *Dinamika Kependudukan dan kebijakan*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Feith, Herbert. 1981. *Repressive Developmentalist Regimes in Asia. Alternatives* Vol. VII (I)
- Fisher, Ronald J. 1989. *The Social Psychology of Inter-Group and International Conflict Resolution*. New York Springer Verlag.
- Fisher, Simon. Dkk. 2001. *Mengelola Konflik dan Keterampilan untuk Bertindak* (terj) S.N. Kartikasari Indonesia SMK Grafika desa Putra.
- Fraser, Niall M. and Hipel Keith W. 1984. *Conflict analysis Models and Resolutions* New York. North-Holland
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Gafar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Galtung, Johan, 2003, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya, Pustaka Eureka
- Garna, Yudistira K. 1999, *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif*. Bandung Primaco Akademika
- Giddens, Antony dan David Held, (ed). 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai kelompok, kekuasaan dan konflik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Giddens, Anthony 1994, *Beyond Left and Right, the Future of Radical*. Politics Polity Press
- Grasmci, Antonio. 1971. *Selection From the Prison Notebook*. London: Lawrence and Wishart.
- Groom, A.J.R. 1988. *Paradigms in Conflict The Strategist the Conflict Research er and the Peace Researcher Review* International Studies
- Habermas, Jurgen. 1981. *The Theory of Communications action* New York Beacon Press

- 1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere* Cambridge. MIT Press
- Hadiz, Vedi Renandi, 1992, *Politik Budaya dan Perubahan Sosial Ben Anderson dalam Studi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Haramain, A. malik. 2004, *Gus Dur Militer dan Politik*. LKIS Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 1999 *Revormasi Setengah Hati*. Jakarta : Erlangga
- Hasan, Muhammad Kamal. 1987, *Modernisasi Indonesia*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- Hinckley, Barbara. 1981. *Coalitions and Politics* New York : Harcourt Brace Javanovich inc.
- Hofman, Ph.H.C., 1895 *Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van Poso-Alfoer*, Mededeelingen van wege het Nedrlandsch-Zending Genootschap,
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict* Berkeley University of California Press
- Hungtington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : Grafiti.
- Isard, Walter. 1992. *International Conflict and the Sciece of Peace*. Cambridge. MA Blackwell
- Jenkins, David, 1984, *Suharto and His Generals Indonesian Military Politics 1975-1983*, Ichaca New York: Cornel University
- Kantaprawira, Rusadi, 1987, *Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial Aplikasi dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Karim, M. Rusli, 1992, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru* Yogyakarta: Media Widya.
- Katz, Neil M. and Lawyer, JW 1985. *Communication and Conflict Management Skills*. Dubuque Kendal/Hunt Publishing Company
- Khaldun, Ibn. 1962. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta Bulan Bintang.
- Kleden Ignas. 1999 *Politik Aliran Civil Society dan Negara: Indonesia Pasca Soeharto Dalam Almanak Parpol Indonesia Pemilu 99*. Jakarta. API
- Krippendorff. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi* Jakarta . Gramedia
- Kruit, Alb.C., 1938, *De West Toradja op Midden Celebes*, Amsterdam Uitgave van de N.V. Noord Nederlandsche Uitgevers Maatschappij.
- Kruyt, J.Janr 1975 *Keselamatan di Poso Sejarah Gereja Kristen Sulawesi Tengah Sampai 1947*. Jakarta BPK Gunung Mulia.
- Kuntjaraningrat, 1990. *Metode-Metode Penelitian Msasyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Kuntowijoyo. 1985. *Dinamika sejarah Umat Islam Indonesia* Yogyakarta Shalahuddin Press.
- Kusumaatmadja S. 1988, *Sketsa Politik Orde Baru*. Bandung Alumni
- Kusumandaru, Ken Budha. 2004. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme, Sanggahan terhadap Frans Magnis suseno*. Resist Book. Magelang.
- Land, Michael. 1996. *Preventing Violend Conflicts* Washinton D.C. USIP Press
- Lasahido, Tahmidy. Dkk. 2003. *Suara dari Poso Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*. Jakarta YAPPIKA.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta Rineka Cipta
- Liddle, William R, 1988, *Indonesia Politics and Culture in An Arbor: Center for Political Studies Institute to Social Research*. The University of Michigan.

**Surahman Cinu;** Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)

- , 1996. Indonesia Suharto's Tightening Grip. *Journal of Democracy*. Vol 7 no. 4
- , 1996 *Leadership and culture in Indonesia politics* Sidney : Allen and Uhwin
- Lund, Michael 1996. *Preventing Violent Conflicts*. Washinton D.C. USIP Press
- Mahfud MD, Moh (ed.), 1997, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- Malik, Ichsan, 2003, *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Bakubae*. Jakarta, Yappika
- Marger, Martin N. 1981, *Elites and Masses An Introduction to Political Sociology*, New York D.Van Nostrand Company.
- Marx, Karl. Frederick Engels, *Communist Manifesto*, 1848. From Marx to Mao. <http://gate.cruzio.com/marx2mao/index.html>,HTML-markup 1998.
- Mas'oed, Mohtar, 1989, *Struktur Ekonomi Politik Orde Baru, 1966-1971* Jakarta: LP3ES,
- Mappangara, Suriadi, 2001,. *Respon Militer terhadap Konflik Sosial di Poso*, Palu Yayasan Bina Warga.
- Mattulada, , 1989,. Sejarah Kebudayaan „To Kaili“, Palu Universitas Tadulako
- Mc. Donald, Hamish. 1990. *Suharto's Indonesia* Victoria :Fontana Book
- Mills, Wright C. 1963. A Diagnoses of. Our Moral Vneasiness. Kurf david R. Simon and D.Stanley. Etzen Elite Deviance. Boston Toronto.Allyn and Bacon.
- Moleong, Lexy J. , 1989, *Metoda Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Mortimer, Rex, 1973, *Showcase State the Inlusion of Indonesia's 'Accelerated Modernisation*. Australia: Agus and Robertson,.
- Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik Kebijakan ekonomi Indonesia 1950-1980* Jakarta : LP3ES
- Mulyana, Dedi. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung Rmaja Rosdakarya
- Muna, Riefqi, M. (ed). 2002. *Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional* Jakarta. The Ridep Institute
- Nadjamudin, Lukman., 2001, Dari Animisme ke Monoteisme, Kristenisasi di Poso 1892-1942. Yogyakarta, Elstreba .
- Nasution, S. , 1988, *Metoda Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung Tarsito.
- Nawawi H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajahmada University Press
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Noer, Deliar. 1983. *Ideologi Politik dan Pembangunan* Jakarta Yayasan Pengkhidmatan
- O'Donnel, Guillermo, (ed), 1993. *Transisi menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai Perspektif*. Jakarta: LP3ES.
- , (ed), 1993 *Transisi Menuju Demokrasi Kasus Amerika Latin* Jakarta LP3ES.
- , (ed) 1993 *Transisi menuju Demokrasi Kasus Rangkaian Kemungkinan dan Ketidak Pastian*. Jakarta LP3ES
- Pabottinggi, Mochtar, (peny.), 1986, *Islam: Antara Fisi, Tradisi dan Hegemoni Bukan-Muslim* Jakarta, yayasan Obor Indonesia.
- Patria, Nezar & Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poloma, M. Margaret, 2000 *Sosiologi Kontemporer* Jakarta. Rajawali.
- Poulandtzas, Nicos, 1974, *Classes in Contempoary Capitalism*, London: Lowe and Brydone.

- , 1992. *Islam dan Demokrasi dalam Agama dan Demokratisasi, dari Seminar sehari*. Jakarta; P3M.
- , (ed) 1986, *Islam Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri* Jakarta:Rajawali Pers.
- Ross, Marc Howard. 1993. *The Management of Conflict Interpretations and Interests in Comparative Perspective*. New Haven. Yale University Press
- Roxborough, Ian, 1986, *Teori-Teori Keterbelakangan*, Jakarta: LP3ES.
- Robison, Richard. 1986. Indonesia: *The Rise of Capital*. Sidney: Allen and Unwin
- Rudianto, R Bambang, (ed), 1992, *Diskursus Kemasyarakatan dan kemanusiaan* Jakarta: Gramedia,.
- Salampessi, Zairin et.al, 2001. *Ketika semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu*. Jakarta.. Sekretariat Tapak Ambon.
- Samego, Indria. 1998 *Bila ABRI Berbisnis*. Mizan Bandung.
- Sanghcai, Somporn. 1976. *Coalition Behaviour in Modern Thai Politics*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
- Scocpol, Theda, 1991, *Negara dan Revolusi Sosial : Sebuah Studi perbandingan Antara Perancis, Rusia dan China*, Jakarta: Erlangga.
- Shaw Martin, 2001,., *Bebas dari Militer, Analisis Sosiologis atas Kecenderungan Masyarakat Modern*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sihbudi, Riza, 1986, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, Bandung: Mizan
- Smith, Anthony D, 1981,., *The Ethnic Revival in the Modern World*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Smith, Anthony D. 1991 *National Identity*. Penguin Books
- Soedarmadji, Tjoek,. 1983, *Mengenal Buol Toli-Toli, Buol Toli-Toli Pemerintah Daerah*.
- Soejito, Irawan, 1984, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid 1, Jakarta, Pradya Paramita
- Soewardi, Herman. 1999. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru tentang Timbul-Tenggelamnya sivilisasi* Bandung. Bakti Mandiri
- , 2004. *Sosiologi, Membangkitkan Karsa Umat Tumpuan Utama Bagi Pembangunan*. Bandung. Bakti Mandiri.
- Stepan, Alfred. 1988. *Militer dan Demokratisasi Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Lain*. Jakarta. PT Pustaka Utama grafiti.
- Storey, John. (ed). 1994 *Cultural Theory and Popular Culture*. New York : Harvester A. Reader
- Suaedi, Ahmad, (ed). 1994. *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Institut Dian/Intervidei.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta : LP3ES.
- Tanter, Richard dan Kenneth Young, 1993, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Tjandrasasmita, Uka, 1965,., *Samudra Pasai Kerajaan Pengembang Islam Pertama di Indonesia*, Jakarta, Jaya
- Tukiran (ed). *Mobilitas Penduduk Indonesia Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Turmudzi, M. Didi, (ed) 2005. *Berkatya dibelantara Budaya, Dinamika Budaya Lokal, Partisipasi, dan Pembangunan..* Bandung. CV. Indra Prahasta.
- Uhlin, Anders, 1998, *Oposisi Berserak, Arus Deras Gelombang Demokratisasi*

**Surahman Cinu;** Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)

- Gelombang Ketiga di Indonesia.* Bandung: Mizan.
- Varma, S.P. *Toeri Politik Modern.* 1987 Jakarta : Rajawali
- Vatikiotis, Michael R.J. 1992, *Indonesian Politics Under Soeharto: Order Development and Pressure for Change* London & New York Routledge
- Visscher, Charles De, 1957. *Theory and Reality in Public International Law,* New Jersey: Princeton University Press.
- Widjayanto, Andi (ed) "Reformasi Intelijen negara", Jakarta Pacivis UI
- Widoyoko, Danang, (ed) 2003, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi,* Jakarta Indonesia Corruption Watch..
- Zartman, I William and J. Lewis Rasmussen. 1997. *Peacemaking in International: Conflict Methods & Techniques.* Washington D.C. USIP.
- B. Jurnal.**
- Abdalla, Ulil Abshar, 1995, "Ummat Islam dan Politik Representasi", Jakarta. *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol. VI.
- Abdel, salam 2004, Kerangka Teoritis penyelesaian Konflik. Melalui <http://www.cmdd.org/artikel/ef.htm> 19 Juli
- Aditjondro, George Junus, 2004, Negeri Tentara, Membongkar Ekonomi Politik Militer Bisnis Militer di Poso. Yogyakarta *Wacana, Insist*
- Aditjondro, George Junus, 2005, Setelah Gemuruh Wera Sulewana di Bungkam : Dampak Membangun PLTA Poso dan Jaringan Sutet di Sulawesi, Palu, *Yayasan Tanah Merdeka.* Kertas Posisi 03
- Adimihardja, Kusnaka. 2001 Amok Massa di Tasikmalaya, Kota Santri yang Ramah dan Santun di Jawa Barat. *Cakradonya* 1 : 1-8
- Anderson, Ben. ROG. 1982. Old State, New Society : Indonesia's New Order Comparative Historical Perspective. *Journal of Asian Studies* Vol. XLII (3).
- Collins, Elizabeth. Fuller. Indonesia Sebuah Budaya kekerasan ? Melalui <http://www.cmdd.org/artikel/efc.htm>, 19/07/2004
- Fatah, Eep Saifulloh, 1994, "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi Orde Baru", *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6 Vol.V. Jakarta: LSAF
- International Crisis Group, 2000. *Indonesia : keeping the military under control.* Jakarta/ Brussels International Crisis Group (ICG)
- International Crisis Group, 2005 *Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons From Maluku and Poso* Tanpa Penerbit.
- Liddle, R. William, 1993, "Otonomi Relatif Politisi Dunia Ketiga: Orde Baru dan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Komparatif", Jakarta: *Afkar*, Vol.I, No. 1, April-Juni.
- Rakhmat. Jalaluddin. 1992. Islam dan Demokrasi dalam *Agama dan Demokrasi* dari seminar sehari. Jakarta: LP3M.
- Rais, M. Amin, 1994, "Suksesi 1998 : Suatu Keharusan," *Sintesa*, No.09/Th.II, Juni-Juli.
- Sangaji, Arianto, 2005, Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah, Palu, *Yayasan Tanah Merdeka,* Kertas Posisi 04.
- Suparlan, Parsudi. 1999 a, Kemajemukan, Hipotesis, Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. *Antropologi Indonesia* 58. 13-20.

- \_\_\_\_\_. 1999 b. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia* 59 7 - 19
- Surahman, 2001, Interaksi Politik antara ICMI dan Orde Baru, Studi tentang Aliansi Politik di Masa Orde Baru. *Thesis*. Bandung. Universitas Padjadjaran
- Wahid, Abdurrahman, Merumuskan Hubungan Idologi Nasional dan Agama, *Aula Tanpa Tahun Terbit*
- C. Makalah**
- Adimihardja, Kusnaka. Ibnu hajar. 2000. Konflik dan Resolusi konflik Kasus di propinsi Sumatera utara. *Laporan Penelitian Bandung, Forum Rektor*.
- Aditjondro, George Junus, 1993, Analisa Kritik terhadap LSM. Makalah pada *Seminar Paradigma dan Teori-teori Perubahan Sosial*, Salatiga: 6-7 Maret, Salatiga
- , 2004. Kerusuhan Poso dan Morowali Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya, Makalah pada "Penerapan Keadaan darurat di aceh, Papua dan Poso" 7 Januari Jakarta
- Anggoro, Kusnanto, 2002. Hubungan Sipil Militer : State of the Art dan Strategi pendidikan. Makalah pada seminar *Perdamaian dan Resolusi Konflik* Gajah Mada Yogyakarta.
- Budiman, Arief, 1993, Analisa Kritik terhadap Teori-teori Pembangunan, makalah pada *Seminar Paradigma dan Teori-Teori Perubahan Sosial*, Salatiga: 6-7 Maret.
- Cinu, Surahman 2001 Antara Politik Spasialisasi dan Hegemoni Negara. Makalah Seminar tentang *Teori Perubahan Sosial* di Universitas Padjadjaran Bandung
- Juliantara, Dadang, 2002. Sengketa Agraria. Makalah pada *seminar Perdamaian dan Resolusi Konflik*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Mugasejati, Nanang Pamuji. 2002 Perdamaian Internasional : State of the Art dan Edukasi. Makalah pada *Seminar perdamaian dan Resolusi Konflik* Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Munir, 2000. *Indonesia Violence and the Integration Problem*. Makalah. Disampaikan pada konferensi mengenai "Conflic and Violence in Indonesia". Humboldt University. Berlin. 3-5 Juli
- Praja, Juhaya S, 1999, Agama dan Politik Hubungan Agama dengan Politik di Dunia Islam dan Implikasinya dalam Bidang Pendidikan, Hukum dan Ekonomi, *Orasi pada Wisuda Sarjana ke-5 STAI Al-Fatah*, Bandung.
- Rais, M. Amien. 1990. Transformasi Masyarakat dan Perkembangan Global. Dalam *prosiding Simposium Nasional Cendekiawan Muslim 1990, Membangun Masyarakat Indonesia abad XXI*. Jakarta :ICMI.
- Riyanto, Sigit, Hukum dan Resolusi Konflik, Makalah pada seminar *Perdamaian dan Resolusi Konflik*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.



**D. Koran dan Majalah**

*Baruga*, Edisi V/Desember 2003,  
Sintuwulemba dan Lombogia  
Kapan Kembali

*Berita Kontras*, No. 3/V-IV/2005, Derita  
Poso yang Tak Kunjung Usai

*Kompas* 22 November 1999, .  
Anggaran Militer dan Modernisasi  
Senjata TNI.

*Kompas* 2 Juli 2000, . Bank Dunia dan  
IMF Minta Dana Nonbutjeter TNI di  
Audit.

*Kompas* 20 November 2000., Prof Bilver  
Singh : Pengelompokan di TNI  
Jangan Timbulkan perpecahan

*Kompas* 31 Mei 2005

*Kompas* 14 Juli 2005

*Kompas*, 14 Februari 2006, TNI Jangan  
Main Api Politik

*Kontan* No. 31 Tahun III. 31 Mei 1999.  
Bisnis Prajurit di Hutan Rimba,  
Yayasan ABRI menguasai 2 juta  
Hektar HPH.

*Media Indonesia*,. 31 Januari 2001.,  
Militer Banyak Kuasai Lahan  
Bisnis, Hasil Penelitian di Lima  
Kodam

*Republika*, 16 Januari 2000., Reformasi  
TNI Pastiakan menyentuh Bisnis  
Militer.

*Sabili*, No. 16 Tahun XIII 24 Muharram  
1427. Skandal Freeport Indonesia  
Terjual

*Sangkomp* Edisi II Desember 2002,  
Teror dalam Selimut Damai Poso.

*Sangkomp*, Juni – Juli 2004, Operasi  
Kelar *Koramil* Muncul

*Seputar Rakyat*, Edisi 02 Tahun II.  
Desember 2003 – Januari 2004,  
Poso Damai Tak Kunjung Tiba,  
Langit Belum Runtuh

*Seputar Rakyat*, Edisi 03 Tahun II 2004  
Korupsi di Tengah Reruntuhan  
Poso

*Seputar Rakyat*, Edisi 04 Tahun 2005  
Korupsi Poso Teror Poso

*Setara*, Sekilas tentang Perempuan  
Juni 2005. Perempuan Sulten  
dalam Lilitan Kekerasan

*The New York Times*, 10 Januari 2002,  
Lihat Seethes, and Grows, on  
Indonesian Island

*Tempo*, 13 November 2005, Belum  
Damai di Poso.

*Tempo*, 8 Januari 2006, Uang Kantin  
Bukan Uang Jago

*Tempo* 15 Januari 2006. Pemain Lama  
di Rumput Kering